

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

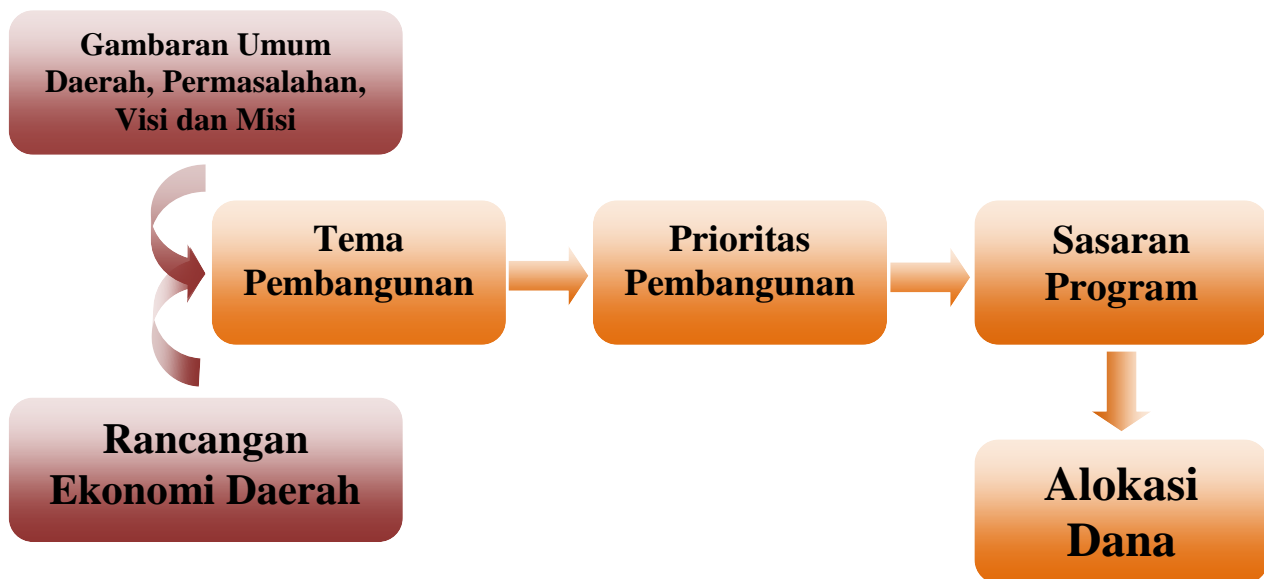
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan di Daerah diwujudkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Tahun 2011 – 2016 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014, memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan capaian kinerja sasaran tahun 2012, kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 dilaksanakan melalui penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana. Rancangan awal disusun berupa prioritas yang didasarkan pada data kondisi daerah dan analisisnya. Setelah itu dilaksanakan Musrenbang Kota untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan Kota Tangerang Selatan. Perumusan rancangan akhir dilakukan dengan melakukan penyusunan urutan prioritas dari usulan-usulan yang masuk pada saat Musrenbang Kota Tangerang Selatan dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah dan selanjutnya ditetapkan berupa Peraturan Walikota.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Kota Tangerang Selatan sudah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Daerah RPJMD) sehingga RKPD Tahun 2014 mengacu kepada RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016.

RKPD Tahun 2014 memuat isu strategis, kondisi perekonomian daerah, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan yang merupakan prioritas daerah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian dokumen RKPD Tahun 2014 ini menjadi acuan dalam penyusunan anggaran. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 disusun mengacu pada dokumen RKPD Tahun 2014 ini. Dalam hubungan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2014, Renja-SKPD mengacu kepada RKPD ini sekaligus menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2014.

**Gambar 1.1**  
**Skema Alur Penyusunan RKPD**



Penyusunan RKPD Tahun 2014 dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode atau kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang melalui dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional. Sedangkan proses top-down diimplementasikan dalam bentuk *Dedicated Program* (Program Khusus).

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKPD Tahun 2014 ini disusun mengacu kepada sejumlah peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

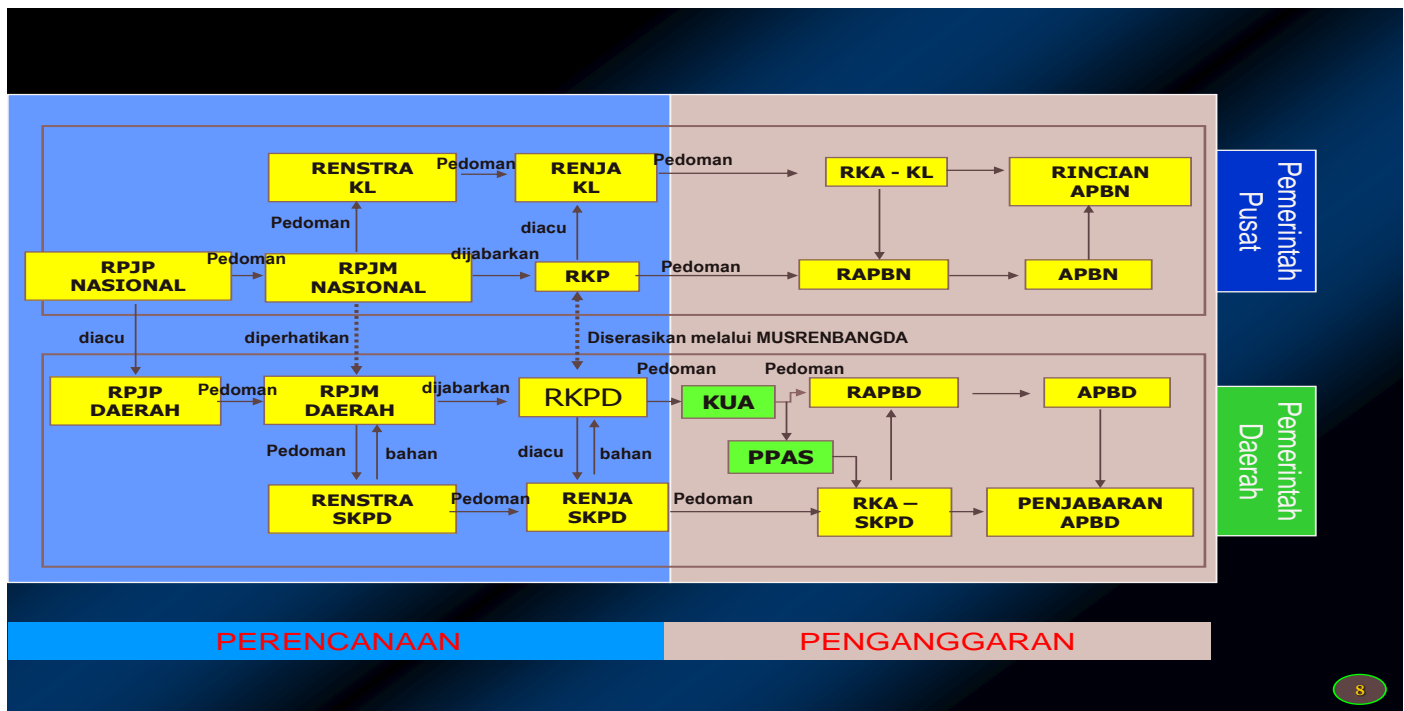
### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan yang kesemuanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2014 adalah perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2011 – 2016). Pada dasarnya, perencanaan tahunan merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah untuk waktu 1 tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan suatu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (3) Renstra-SKPD, (4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan (5) Renja-SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.

**Gambar 1.2**  
**Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya**



----- UU No. 25 Tahun 2004 ----- UU No. 17 Tahun 2004

----- UU No. 32 Tahun 2004 -----

Sumber: Undang-undang No. 25 Tahun 2004.

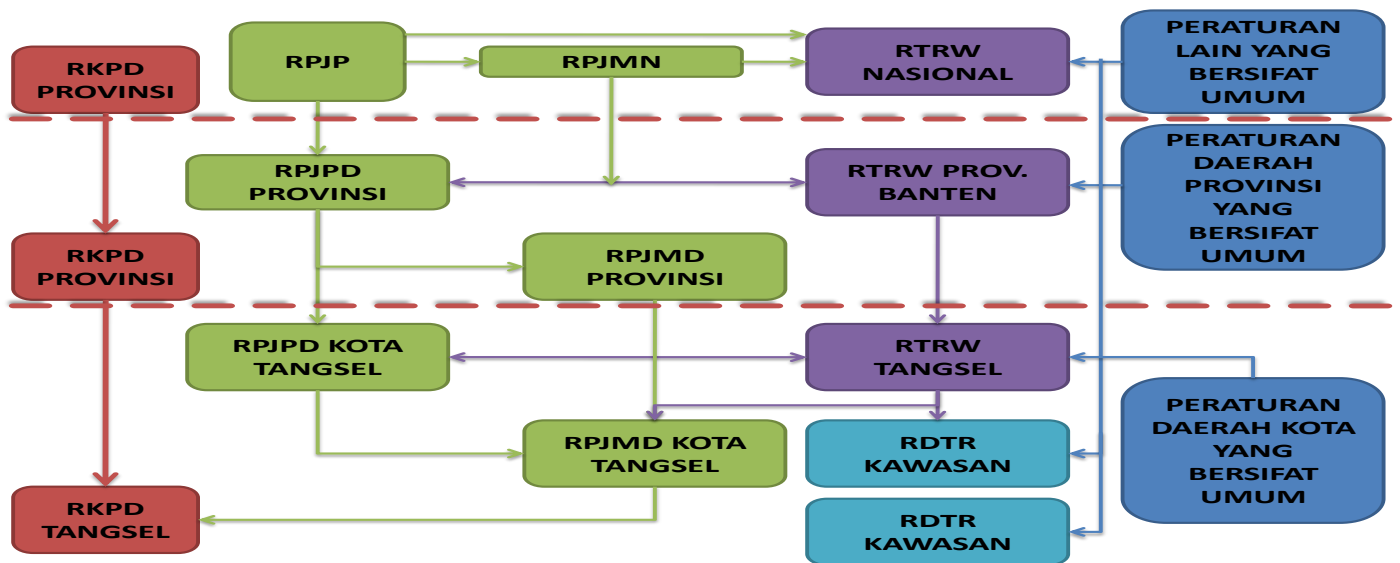
Mengacu pada gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKPD Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD;
- RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2014 ini mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2014, RKPD Provinsi Banten Tahun 2014, RPJM Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016, Renstra SKPD Tahun 2011 – 2016, serta Renja SKPD Tahun 2014. Selain itu kedudukan RKPD Kota Tangerang Selatan tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.3 seperti dibawah ini.

Gambar 1.3

**KEDUDUKAN RKPD KOTA TANGERANG SELATAN DIANTARA DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

**1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 disajikan dengan tata urutan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistemaitka Penyajian serta Maksud dan Tujuan;

**BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Bab ini berisikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, serta Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah;

**BAB III: KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini berisikan uraian tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;

**BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini berisikan uraian tentang Tujuan, Sasaran, Tema dan Prioritas Pembangunan;

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Bab ini berisikan uraian tentang Pelaksanaan Urusan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Derah Tahun 2014;

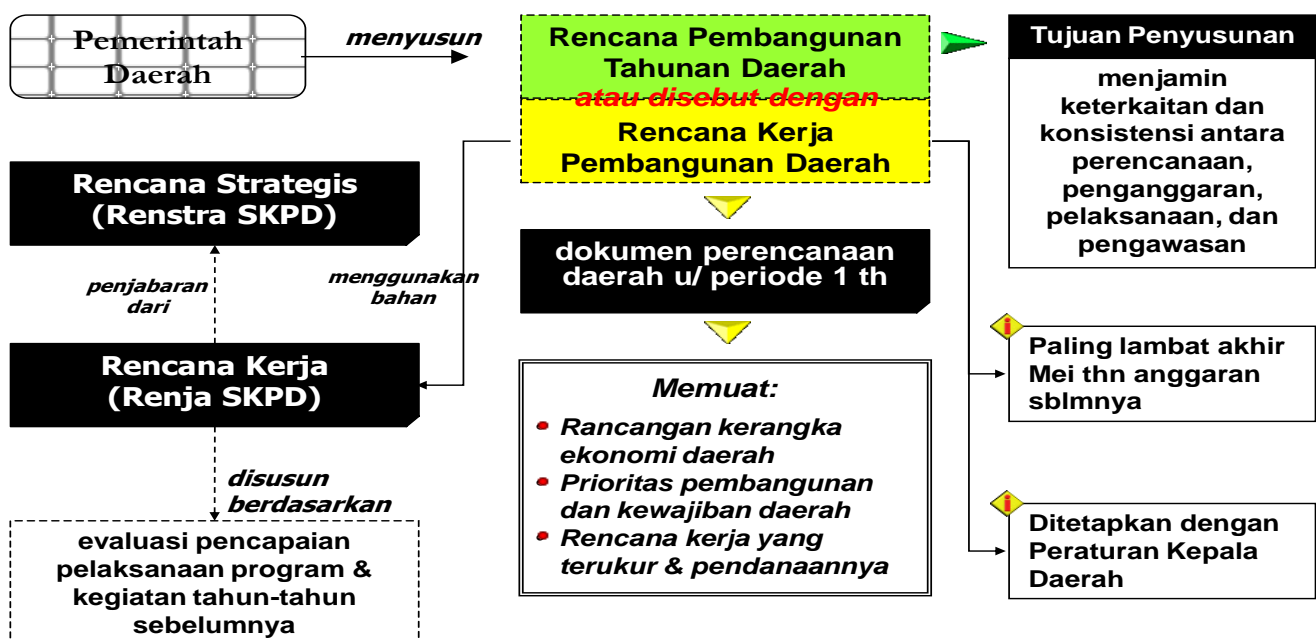
**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan uraian tentang kaidah pelaksanaan umum dan pengorganisasian pelaksanaan agenda pembangunan di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2014.

**1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

**Gambar 1.4**  
**Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)**



Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 ditujukan untuk:

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2014;
2. Merumuskan kerangka ekonomi daerah;
3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2014;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2014;
4. Sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2014;
5. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2014.



**BAB II****EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 disusun berdasarkan Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2013. Kegiatan evaluasi kinerja pada dasarnya dapat dipandang dari dua fungsi utamanya yakni: (1) bagi keperluan "eksternal pemerintah", menjadikan evaluasi sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama ini. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk kepada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai. (2) bagi keperluan "internal pemerintah", menjadikan evaluasi sebagai sarana monitoring pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah dapat ditingkatkan dimasa mendatang secara berkelanjutan.

**2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH****2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Pembentukan daerah otonom baru tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Luas Kota Tangerang Selatan sebesar 147,19 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan dan 54 (lima puluh empat) Kelurahan. Kota Tangerang Selatan terletak di sebelah Timur Provinsi Banten dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pinang, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

**Tabel 2.1**  
**Demografi Kota Tangerang Selatan**

Demografi	Kota Tangsel 7 Kecamatan
Kelurahan	54
Jumlah (Orang)	1.355.926
Luas Wilayah (Km2) *)	147,19
Kepadatan (Orang/Km2)	9.212

Sumber : Kota Tangerang Selatan Dalam Angka Tahun 2012, BPS Kota Tangerang Selatan, 2012

\*) Berdasarkan UU No. 51 Tahun 2008

Luas wilayah masing-masing kecamatan tertera dalam Tabel 2.2. Kecamatan dengan wilayah paling besar adalah **Pondok Aren** dengan **luas 29,88 Km<sup>2</sup> atau 20,30%** dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah **Setu** dengan **luas 14,80 Km<sup>2</sup> atau 10,06%**.

**Tabel 2. 2**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan**  
**Kota Tangerang Selatan**

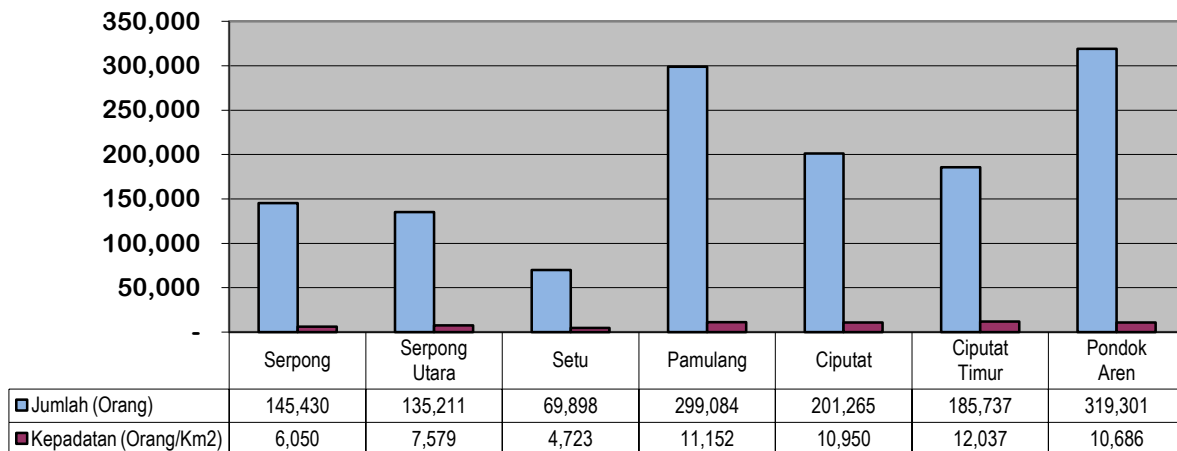
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase terhadap luas kota (%)
1	Serpong	24,04	16,33%
2	Serpong Utara	17,84	12,12%
3	Ciputat	18,38	12,49%
4	Ciputat Timur	15,43	10,48%
5	Pamulang	26,82	18,22%
6	Pondok Aren	29,88	20,30%
7	Setu	14,80	10,06%
<b>Kota Tangerang Selatan</b>		<b>147,19</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Kota Tangerang Selatan Dalam Angka Tahun 2012, BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Serpong, Serpong Utara, Setu, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren kemudian kelurahan berjumlah 54 kelurahan. Pada tahun 2011, dengan jumlah penduduk 1.355.926 orang (671.771 orang perempuan dan 684.155 orang laki-laki), kepadatan penduduk kota tersebut mencapai 9.212 orang/km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi terdapat di Ciputat Timur (12.037 orang/km<sup>2</sup>) dan kepadatan terendah terdapat di Setu (4.723 orang/km<sup>2</sup>) (Sumber dari BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2012).

**Tabel 2.3**

**Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

Apabila dilihat dari perkembangannya, laju pertumbuhan untuk penduduk Kota Tangerang Selatan rata-rata dari tahun 2009 - 2011 sebesar 5,08 %.

**Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Serpong	72.187	73.243	145.430	<b>98,56</b>
2	Serpong Utara	67.389	67.822	135.211	99,36
3	Setu	35.763	34.135	69.898	104,77
4	Pamulang	151.104	147.980	299.084	102,11
5	Ciputat	102.410	98.855	201.265	103,60
6	Ciputat Timur	93.608	92.129	185.737	101,61
7	Pondok Aren	161.694	157.607	319.301	102,59
	Jumlah	<b>684.155</b>	<b>671.771</b>	<b>1.355.926</b>	<b>101,84</b>

**Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2012**

Kepadatan penduduk yang tinggi baik laki-laki maupun perempuan disebabkan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, yang bukan hanya disebabkan oleh penambahan secara alamiah, tetapi juga tidak terlepas dari kecenderungan masuknya para migran yang disebabkan oleh daya tarik Kota Tangerang Selatan seperti banyaknya perumahan-perumahan baru yang dibangun sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Jakarta dan menjadi limpahan penduduk dari Kota Jakarta. Hal tersebut akan menyebabkan dibutuhkannya ruang yang memadai dengan lapangan kerja baru untuk mengimbangi penambahan tenaga kerja.

### **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga melalui indikator-indikator yang diuraikan berikut ini:

## **1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

### **1.1. Pertumbuhan PDRB**

Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan besaran nilai tambah bruto yang dihasilkan dalam memproduksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian suatu daerah (*region*) tanpa melihat pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi bisa berasal dari daerah tersebut dan atau dari luar daerah tersebut.

PDRB selalu dihitung dalam dua harga yaitu atas dasar harga berlaku dan konstan (tahun dasar 2000). PDRB atas dasar harga konstan memperlihatkan perkembangan produksi riil dari masing-masing sektor ekonomi yang tidak dipengaruhi inflasi. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan perkembangan produksi masing-masing sektor yang masih dipengaruhi oleh harga.

Besaran nilai PDRB Kota Tangerang Selatan diperoleh melalui penjumlahan nilai tambah yang tercipta pada setiap sektor kegiatan ekonomi sebagai akibat adanya proses produksi di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Nilai PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Nilai yang dihasilkan tersebut sangat tergantung pada potensi sumber daya dan faktor produksi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.5.

Tabel 2.5  
 Angka Agregat PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita  
 Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 - 2011

URAIAN	2010*)	2011**)	Laju Pertumbuhan
a. PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	11,615,146.22	13,290,616.88	
b. PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp)	5,378,417.19	5,853,761.25	8.8%
c. Jumlah penduduk pertengahan tahun (Jiwa)	1,290,322	1,355,926	5.1%
d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp)	9,001,742.37	9,801,874.79	
e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 (Rp)	4,168,275.20	4,317,168.67	3.6%

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan,

Ket \*) Angka Perbaikan

\*\*\*) Angka Sementara

Pada tahun 2011, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga (adh) berlaku Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp.13.290.616,88 juta sedangkan PDRB adh konstan adalah sebesar Rp. 5.853.761,25 juta. Angka-angka tersebut meningkat dari total PDRB adh berlaku pada tahun 2010 yang sebesar Rp.11.615.146,22 juta dan PDRB adh konstan yang sebesar Rp.5.378.417,19 juta.

Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2011 mencapai 1.355.926 orang, PDRB per kapita adh berlaku adalah sebesar Rp. 9.801.874,79 sedangkan PDRB per kapita adh konstan adalah Rp. 4.317.168,67.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, berarti semakin besar pula kontribusi sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan data sementara PDRB tahun 2011 adh berlaku, perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan. Berdasarkan PDRB adh konstan, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah sebesar 8,84%. Struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor tersier, yaitu perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; perbankan dan lembaga keuangan serta jasa-jasa yang memberikan kontribusi hingga 72,75%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan) memberikan kontribusi 26,37%, dan sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi 0,88%. Jika dilihat kecenderungan tahun 2010 dan tahun 2011, meskipun seluruh sektor menunjukkan peningkatan, pada PDRB adh berlaku sektor tersier menurun kontribusinya sebesar 1,35% sedangkan pada PDRB adh konstan sektor sekunder menurun kontribusinya sebesar 0,30%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.6 dan 2.7 berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT KELOMPOK SEKTOR**  
**DI KOTA TANGERANG SELATAN**

No.	Kelompok Sektor	2010*)		2011**		Pertumbuhan 2010 ke 2011 (%)
		(Juta Rupiah)	Distribusi (%)	(Juta Rupiah)	Distribusi (%)	
<b>Atas Dasar Harga Berlaku</b>						
1	Primer	92.995,60	0,80%	116.551,00	0,88%	
2	Sekunder	2.934.480,09	25,11%	3.504.886,70	26,37%	
3	Tersier	8.660.734,38	74,10%	9.668.703,00	72,75%	
<b>Total</b>		<b>11.688.210,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.290.140,70</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Atas Dasar Harga Konstan</b>						
1	Primer	50.031,42	0,93%	57.470,00	0,98%	14,87%
2	Sekunder	1.481.930,20	27,55%	1.594.971,00	27,25%	7,63%
3	Tersier	3.846.455,56	71,52%	4.201.320,00	71,77%	9,23%
<b>Total</b>		<b>5.378.417,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.853.761,00</b>	<b>100,00%</b>	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2012

\*) Angka Perbaikan

\*\*\*) Angka Sementara

**Tabel 2.7**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO A.D.H BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA**  
**TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 - 2011 ( JUTA RUPIAH )**

No.	LAPANGAN USAHA	2010*)	2011**)
1	Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan	105.522,91	113.653,00
2	Pertambangan dan Penggalian	2.615,14	2.898,00
3	Industri Pengolahan	1.780.230,92	1.975.202,00
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	393.128,60	446.564,70
5	Bangunan	929.156,27	1.083.120,00
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.594.931,21	4.091.275,00
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.721.915,00	2.002.052,00
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.430.404,39	1.603.954,00
9	Jasa-Jasa	1.657.241,78	1.971.422,00
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>11.615.146,22</b>	<b>13.290.140,70</b>

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2012

\*) Angka Perbaikan

\*\*\*) Angka Sementara

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran selalu mendominasi dan nilainya terus meningkat. Untuk tahun 2011 mencapai angka 30,78 persen hampir sepertiga dari total PDRB Kota Tangerang Selatan atau senilai 4,091 triliun rupiah. Sektor pengangkutan dan komunikasi yang merupakan fasilitator terhadap aktivitas ekonomi menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua mencapai 15,06 persen atau senilai 2,002 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada urutan ketiga adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 14,86 persen atau senilai 1,975 triliun rupiah. Sektor ini sedikit lebih tinggi dibandingkan sektor jasa-jasa yang kontribusinya mencapai 14,83 persen.

Untuk sektor pertambangan dan penggalian dalam tiga tahun terakhir ini masih tetap dengan kontribusi 0,02 persen yang merupakan sektor dengan kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB. Ada kecenderungan kontribusi sektor yang tidak berbasis jasa peranannya makin terus menurun dan sebaliknya yang berbasis jasa peranannya semakin menunjukkan peningkatan. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar berikut ini.

**Tabel 2.8**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 s/d 2011**

NO	Sektor	2008		2009		2010		2011	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	46.816	1,03%	59.501	1,20%	54.254	1,01%	55,944	0,96%
2	Pertambangan &	1.199	0,03%	1.337	0,03%	1.420	0,03%	1,526	0,03%
3	Industri	822.794	18,04%	846.106	17,07%	883.696	16,43%	923,837	15,78%
4	Listrik, Gas & Air bersih	186.349	4,09%	194.450	3,92%	209.112	3,89%	225,001	3,84%
5	Konstruksi	335.232	7,35%	369.740	7,46%	405.924	7,55%	446,133	7,62%
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.495.791	32,80%	1.636.458	33,01%	1.804.654	33,55%	1.993,448	34,05%
7	Pengangkutan & Komunikasi	461.501	10,12%	524.715	10,58%	597.646	11,11%	676,764	11,56%
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	513.390	11,26%	575.205	11,60%	620.073	11,53%	668,843	11,43%
9	Jasa-jasa	697.435	15,29%	750.356	15,13%	801.537	14,90%	862,265	14,73%
	<b>PDRB</b>	<b>4.560.506</b>	<b>100%</b>	<b>4.957.867</b>	<b>100%</b>	<b>5.378.316</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.853,761</b>	<b>100%</b>

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2012

Tabel 2.9

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 s/d 2011

NO	Sektor	2008		2009		2010		2011	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	80.554	0,90%	89.670	0,88%	105.523	0,91%	113.654	0,86%
2	Pertambangan & Penggalian	2.001	0,02%	2.386	0,02%	2.615	0,02%	2.898	0,02%
3	Industri Pengolahan	1.523.643	17,06%	1.599.610	15,71%	1.780.231	15,33%	1.975.202	14,86%
4	Listrik, Gas & Air bersih	333.727	3,74%	356.373	3,50%	393.129	3,38%	447.042	3,36%
5	Konstruksi	612.900	6,86%	790.979	7,77%	929.156	8,00%	1.083.120	8,15%
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.764.649	30,96%	3.164.264	31,07%	3.594.931	30,95%	4.091.275	30,78%
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.243.505	13,92%	1.449.151	14,23%	1.721.915	14,82%	2.002.052	15,06%
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	1.121.422	12,56%	1.283.064	12,60%	1.430.404	12,31%	1.603.954	12,07%
9	Jasa-jasa	1.248.752	13,98%	1.447.727	14,22%	1.657.242	14,27%	1.971.422	14,83%
	<b>PDRB</b>	<b>8.931.154</b>	<b>100%</b>	<b>10.183.223</b>	<b>100%</b>	<b>11.615.146</b>	<b>100%</b>	<b>13.290.618</b>	<b>100%</b>

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2012

Tabel 2.10

**HASIL PERHITUNGAN PDRB KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011**

No.	Sektor	PDRB adhb (Miliar Rp.)	PDRB adhk (Miliar Rp.)	Share (%)
1	[1]	[2]	[3]	[4]
2	Pertanian	114	55,944	0,86
3	Pertamb. & Penggalian	2,898	1,526	0,02
4	Industri	1.975,20	923,837	14,86
5	Listrik, Gas & Air Bersih	446,565	225,001	3,36
6	Bangunan	1.083,12	446,133	8,15
7	Perdagangan Hotel & Resto	4.091,28	1.993,45	30,78
8	Angkutan & Komunikasi	2.002,05	677	15,06
9	Bank & Lemb. Keuangan	1.603,95	668,843	12,07
10	Jasa-jasa	1.971,42	862	14,83
	<b>TOTAL P D R B</b>	<b>13.290,62</b>	<b>5.853,76</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2012



**Tabel 2.11**

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

Kota Tangerang Selatan

NO	Sektor	2008		2009		2010		2011	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	0,90%	1,03%	0,85%	0,96%	0,77%	0,90%	0,86%	0,96%
2	Pertambangan & Penggalian	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%
3	Industri Pengolahan	17,06%	18,04%	15,77%	16,91%	14,44%	15,82%	14,86%	15,78%
4	Listrik, Gas & Air bersih	3,74%	4,09%	3,49%	3,93%	3,27%	3,80%	3,36%	3,84%
5	Konstruksi	6,86%	7,35%	7,19%	7,63%	7,40%	7,93%	8,15%	7,62%
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	30,96%	32,80%	31,29%	32,95%	32,16%	33,29%	30,78%	34,05%
7	Pengangkutan & Komunikasi	13,92%	10,12%	14,62%	10,61%	14,81%	11,11%	15,06%	11,56%
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	12,56%	11,26%	12,68%	11,63%	12,88%	12,21%	12,07%	11,43%
9	Jasa-jasa	13,98%	15,29%	14,09%	15,35%	14,24%	14,92%	14,83%	14,73%
	<b>PDRB</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2012

PDRB per kapita masih dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro yang dapat dijadikan cermin kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PDRB per kapita yang diterima oleh penduduk berarti semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, penurunan PDRB per kapita pada suatu daerah menggambarkan penurunan tingkat kesejahteraan. Perlu diingat pula, bahwa kesejahteraan penduduk akan meningkat jika peningkatan PDRB per kapita melebihi inflasi yang terjadi. Akan tetapi, nilai PDRB per kapita semata-mata tidak dapat dijadikan acuan untuk melihat pemerataan kemakmuran. Di dalam PDRB, yang dimaksud PDRB per kapita adalah PDRB per kapita atas dasar harga berlaku.

PDRB Perkapita Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011 mencapai Rp. 9,802 juta lebih tinggi jika dibandingkan nilai PDRB perkapita tahun sebelumnya sebesar Rp 9,001 juta. Bila dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000, akan diketahui pertumbuhan PDRB perkapita secara riil. Berdasarkan harga konstan, PDRB perkapita Kota Tangerang Selatan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp. 4,168 juta menjadi Rp. 4,317 juta.

## 1.2 Laju Inflasi Kota Tangerang Selatan

Perhitungan inflasi untuk harga konsumen belum dilakukan khusus untuk Kota Tangerang Selatan karena belum dihitungnya IHK untuk kota baru. Sehingga, asumsi inflasi untuk harga konsumen di Kota Tangerang Selatan masih menggunakan angka Kota Tangerang.

**Tabel. 2.12**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2008 - 2011**  
**Kota Tangerang dan Provinsi Banten**

Uraian	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Kota Tangerang	10,75%	1,30%	6,08%	3,78%	5,48%
Provinsi Banten	11,47%	2,86%	6,10%	4,73%	6,29%

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2012

## 2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.1 Angka melek huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Dalam perhitungan IPM pada tahun 2011 menurut BPS Kota Tangerang Selatan, angka melek huruf yang digunakan adalah AMA penduduk usia berusia 15 tahun ke atas, yaitu 98,19. Meskipun AMH di Kota Tangerang Selatan ini tergolong cukup baik namun sebagai daerah terbuka yang juga berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta tentunya juga harus menjadi kewaspadaan dan perhatian Pemerintah Kota Tangerang Selatan karena bukan tidak mungkin dengan potensi pertumbuhan yang pesat mendorong terjadinya urbanisasi masuk ke Kota Tangerang Selatan baik dari wilayah sekitar seperti dari daerah lain di Provinsi Banten, maupun sekitar Bogor Jawa Barat, bahkan dari Provinsi lain yang mungkin saja urbanisasi ini banyak terdiri dari kalangan pendidikan rendah ataupun masih buta huruf.

Indikator pendidikan yang lain dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu rata-rata lama sekolah (RLS), Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2011 mencapai 10,80 tahun. Jika dilihat dari rata-rata lama sekolah seluruh Kab/Kota se Provinsi Banten, hal ini merupakan angka Rata-rata Lama Sekolah tertinggi di Banten. meski sebagai daerah otonom baru yang lahir di tahun 2008 hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan memiliki kondisi pendidikan masyarakatnya yang sudah relatif lebih maju di banding daerah lainnya, disamping secara geografis sebagian besar wilayah kecamatannya berbatasan dan berinteraksi langsung dengan Provinsi DKI Jakarta seperti Pondok Aren, Pamulang dan Ciputat juga banyak tersebar sekolah dan perguruan tinggi yang berada di wilayah tersebut, seperti terdapat kampus Universitas Terbuka (UT) di Pamulang, Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) di Pondok Aren, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) di Ciputat Timur dan perguruan tinggi swasta lainnya.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten masih dibawah Kota Tangerang Selatan, yaitu hanya mencapai 8,32 tahun. Rata-rata lama sekolah ini sangat dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan penduduk untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi namun disisi lain juga peningkatan fasilitas serta prasarana gedung sekolah dan yang lebih penting adalah program kebijakan dari pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah khususnya bagi kalangan masyarakat kurang mampu.

**Tabel 2.13**

**Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tangerang Selatan**

No.	Indikator	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Angka Melek Huruf (AMH)	98,12	98,14	98,15	98,19
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,94	9,95	10,15	10,80

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

**2.1.1. Aspek Pelayanan Umum**

**A. Fokus Layanan Urusan Wajib**

**A.1. Angka Partisipasi Sekolah**

**Tabel 2.14**

**Tingkat Partisipasi Kasar Penduduk  
Kota Tangerang Selatan Tahun 2008 – 2011**

Pendidikan	2008	2009	2010	2011
S D	97,58	99,25	113,21	100,59
S L T P	89,20	89,33	68,42	102,70
S L T A	65,80	71,10	78,45	79,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

**Tabel 2.15**

**Tingkat Partisipasi Murni Penduduk  
Kota Tangerang Selatan  
Tahun 2008 – 2011**

Pendidikan	2008	2009	2010	2011
S D	80,58	81,25	96,11	91,04
S L T P	48,67	49,33	60,23	73,21
S L T A	38,08	38,76	50,83	60,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

### **2.1.2. Aspek Daya Saing Daerah**

#### **A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Semenjak empat tahun terbentuk, Kota Tangerang Selatan sudah memiliki beberapa kawasan industri dan perdagangan. Luas yang disediakan untuk zona industri di Kota Tangerang Selatan adalah seluas 2218,31 hektar dengan 2386 unit industri yang termanfaatkan. Sedangkan luas yang disediakan untuk kawasan industri adalah seluas 1284 hektar dengan 1614 unit industri yang termanfaatkan. Kawasan perdagangan di Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi dua, yaitu kawasan dengan skala kota dan lokal serta kawasan perdagangan jasa. Luas yang disediakan untuk kawasan perdagangan skala kota dan lokal adalah seluas 1050 hektar, sedangkan untuk kawasan perdagangan jasa seluas 1224,79 hektar.

Selain kawasan perindustrian dan perdagangan, Kota Tangerang Selatan juga memiliki kawasan pergudangan. Lahan kawasan pergudangan pun terbagi menjadi dua, yaitu lahan yang disediakan untuk kawasan pergudangan, yaitu sebesar 2218,31 hektar dengan perusahaan 2386 unit dan lahan yang disediakan untuk zona gudang, yaitu sebesar 3502,31 hektar dengan 2386 unit perusahaan. Sebaran industri di Kota Tangerang Selatan banyak ditemukan tersebar di beberapa kecamatan di Kota Tangerang Selatan di antaranya adalah terdapat 1 industri kerajinan anyaman di Kecamatan Pondok Aren, 12 industri makanan di Kota Tangerang Selatan, dan 66 Pabrik di Kota Tangerang Selatan yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Terdapat ada 12 (dua belas) pasar tradisional yang berada di tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan, diantaranya:

**TABEL 2.16**  
**PASAR DAERAH / TRADISIONAL**  
**DI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012**

NO.	NAMA PASAR	LUAS AREAL (M2)	LOKASI (KECAMATAN)	PEDANGAN G (ORANG)	PENGELOLA
1	Pasar Ciputat	5.670	Ciputat	816	PD. Pasar Niaga Kerta Raharja
2	Pasar Jombang	6.095	Ciputat	386	PD. Pasar Niaga Kerta Raharja
3	Pasar Serpong	8.730	Serpong	837	PD. Pasar Niaga Kerta Raharja
4	Pasar Bintaro Sektor 2	2.600	Ciputat Timur	135	PD. Pasar Niaga Kerta Raharja
5	Pasar Ciputat Permai	1.000	Ciputat	55	PD. Pasar Niaga Kerta Raharja & PT. Tritama Nila Griya
6	Pasar Gedung Hijau	3.395	Serpong Utara	3	PT. Alam Sutera Reality, TBK & PD. Pasar Niaga Kerta Raharja
7	Pasar Modern BSD	30.000	Serpong	730	PT. BSD
8	Pasar Segar Graha Raya Bintaro	10.250	Serpong Utara	644	PT. Wahana Jaya Sentosa
9	Pasar Delapan	34.945	Serpong Utara	208	PT. Alam Sutera Reality, TBK
10	Pasar Modern Bintaro Jaya	17.000	Pondok Aren	492	PT. Bintaro Jaya
11	Pasar Jengkol	1.500	Setu	40	PemKot Tangerang Selatan
12	Pasar Kita	17.000	Pamulang	(Baru)	-

Sumber: Disperindag Kota Tangerang Selatan, Tahun 2012

**TABEL 2.17**  
**REKAPITULASI TOKO MODERN PER KECAMATAN**  
**BERDASARKAN TATA RUANG ZONA PERDAGANGAN**

NO.	KECAMATAN	ZONASI / LETAK				
		SUB TOTAL	SESUAI	TIDAK SESUAI		
				RUKO	BUKAN	JUMLAH
1	Ciputat	72	60	2	10	12
2	Ciputat Timur	41	28	1	12	13
3	Serpong	62	56	1	5	6
4	Serpong Utara	67	64	-	3	3
5	Pamulang	56	41	-	15	15
6	Setu	12	8	1	3	4
7	Pondok Aren	68	60	1	7	8

Sumber: Disperindag Kota Tangerang Selatan, Tahun 2012

### B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Jumlah jalan Kota dan jalan strategis Kota di Kota Tangerang Selatan tercatat sebanyak 421 buah, dengan total panjang jalan sebesar 539,707 meter. Kecamatan yang memiliki jalan terpanjang adalah Kecamatan Pondok Aren yaitu sebesar 96,203 meter sedangkan yang paling pendek adalah kecamatan Setu yaitu hanya 24.017 meter.

**TABEL 2.18**  
**REKAPITULASI RUAS JALAN KOTA DAN RUAS JALAN STRATEGIS KOTA**

NO.	KECAMATAN	STATUS RUAS JALAN				Total	
		JALAN KOTA		JALAN STRATEGIS KOTA		JUMLAH RUAS	JUMLAH PANJANG (M)
		JUMLAH RUAS	JUMLAH PANJANG (M)	JUMLAH RUAS	JUMLAH PANJANG (M)		
1	Serpong Utara	22	25.039	12	7.291	34	32.330
2	Serpong	12	21.432	34	30.689	46	52.121
3	Pondok Aren	33	57.406	47	38.797	80	96.203
4	Ciputat Timur	23	24.261	59	34.835	82	59.095
5	Ciputat	27	33.814	34	22.430	61	56.245
6	Setu	5	6.645	18	17.372	23	24.017
7	Pamulang	49	58.541	46	27.112	95	85.653
<b>Total</b>		<b>171</b>	<b>227.138</b>	<b>250</b>	<b>178.526</b>	<b>421</b>	<b>405.664</b>

Sumber: Dinas Bina Marga & SDA Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

**TABEL 2.19**  
**DATA PANJANG DAN KONDISI JALAN PROVINSI BANTEN**  
**DI KOTA TANGERANG SELATAN**

NO.	NOMOR RUAS	NAMA JALAN	PANJANG REVISI (Km)	KONDISI TAHUN 2012	
				MANTAP	TDK MANTAP
1	49	Jl. Serpong Raya	5,62	5,62	-
2	50	Jl. Pahlawan Seribu	10,38	9,38	1
3	51	Jl. Serpong - Parung	1,55	0,55	1
4	52	Jl. Aria Putra ( Ciputat)	4,5	4,25	0,25
5	53	Jl.Raya Jombang	6,8	6,8	-
6	55	Jl. Oto Iskandardinata ( Ciputat)	1	1	-
7	56	Jl.H.Usman ( Ciputat)	0,46	0,46	-
8	58	Jl. Siliwangi	2,66	2,66	-
9	57	Jl.Pajajaran (Ciputat)	2,1	1,1	1
10	59	Jl.Puspitek Raya	4,35	3,15	1,2
11	60	Jl. Surya Kencana - Simpang DR. Setiabudi	2,32	2,32	-
12	61	Jl. Cabe Raya - Cireunde Raya	7,02	7,02	-
<b>JUMLAH</b>			<b>48,76</b>	<b>44,31</b>	<b>4,45</b>

Sumber: Dinas Bina Marga & SDA Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

Kota Tangerang Selatan juga memiliki jalan Provinsi Banten dengan panjang 48,76 kilometer. Kondisi jalan Provinsi yang kualitasnya baik sepanjang 44,31 kilometer sedangkan yang kurang baik sepanjang 4,45 kilometer.

**TABEL 2.20**  
**DATA JUMLAH DAN PANJANG JEMBATAN**  
**DI KOTA TANGERANG SELATAN**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	PANJANG
1	Pamulang	7	± 55,30 M
2	Pondok Aren	64	± 328 M
3	Ciputat	24	± 113,47 M
4	Ciputat Timur	32	± 427,50 M
5	Serpong Utara	19	± 115 M
6	Serpong	16	± 142 M
7	Setu	15	± 338 M
	<b>JUMLAH</b>	<b>117</b>	<b>± 711,27 M</b>

*Sumber: Dinas Bina Marga & SDA, Pendataan Tahun 2010*

Kota Tangerang Selatan memiliki jembatan sejumlah 117 buah dengan total panjang 711,27 meter yang tersebar di masing-masing kecamatan. Jumlah jembatan yang terbanyak dimiliki Kecamatan Pondok Aren, yaitu sebanyak 64 buah jembatan, sedangkan yang paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Pamulang, yaitu hanya memiliki jembatan sebanyak 7 buah. Akan tetapi panjang jembatan yang paling panjang terdapat di Kecamatan Serpong, sedangkan yang terpendek dimiliki oleh Kecamatan Pamulang.

Untuk mendukung pengoperasian angkutan kereta api, di wilayah Kota Tangerang Selatan dilengkapi dengan 5 stasiun dengan kondisi yang belum memadai dari segi kapasitas maupun tingkat pelayanan. Jaringan kereta api pada Jalur padat yang melayani angkutan komuter seperti pada lintas Tangerang-Jakarta dan lintas Serpong-Jakarta yang masih dilayani dengan spur tunggal (single track) dan saat ini, terdapat 5 stasiun kereta api di Kota Tangerang Selatan:

**Tabel 2.21**  
**Stasiun Kereta Rel Listrik di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**

No	Nama Stasiun Kereta Rel Listrik	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Lokasi	Panjang	Luas (m <sup>2</sup> )	
				(KM+HM)	SPUR (M)	Tanah	Bangunan
1	Stasiun Serpong	Serpong	Serpong	30+185	4x1376,7 0	34.250	231
2	Stasiun Rawabuntu	Rawabuntu	Serpong	-	-	-	-
3	Stasiun Sudimara	Jombang	Ciputat	24+244	3x2077	34.226	150
4	Stasiun Jurangmangu	Pondok Jaya & Sawah Baru	Pondok Aren	-	-	-	-
5	Stasiun Pondok Ranji	Pondok Ranji	Ciputat Timur	20+071	2x1626	2.800	64

Sumber:

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, 2011

**C. Fokus Sumber Daya manusia**

**C.1. Kualitas tenaga kerja**

Sebanyak 34,54% penduduk Kota Tangerang Selatan berpendidikan lulus SLTA, angka ini merupakan angka terbesar dibandingkan tingkat pendidikan yang lainnya. Sementara itu sebesar 15,0% penduduk Kota Tangerang Selatan berpendidikan tingkat perguruan tinggi.

**Tabel 2.22**

**Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**

No.	Keterangan	Persentase		
		L	P	Total
1	Tidak/ Belum Sekolah	6,12%	5,89%	12,01%
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	4,65%	4,73%	9,38%
3	Tamat SD/ Sederajat	6,79%	8,14%	14,93%
4	SLTP/ Sederajat	7,03%	7,04%	14,07%
5	SLTA/ Sederajat	18,62%	15,92%	34,54%
6	Diploma I/ II	0,41%	0,47%	0,88%
7	Akademi/ DIII/ Sarjana Muda	1,82%	1,98%	3,80%
8	Diploma IV/ Strata I	5,45%	4,18%	9,63%
9	Strata II	0,47%	0,23%	0,70%
10	Strata III	0,05%	0,01%	0,06%
<b>TOTAL</b>		<b>51,40%</b>	<b>48,60%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan,

**C.2. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)**

Dari data jumlah penduduk berdasarkan usia yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2011 sebagian besar penduduk Kota Tangerang Selatan masih terpusat pada selang umur yang produktif. Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 351.779 orang atau sebanyak 25,94%, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 969.588 orang atau 71,51%, dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 34.559 orang atau sebanyak 2,55%.



**Tabel 2.23****Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**

Usia	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Total	%
0 – 4	65.060	9,51	61.786	9,20	126.846	9,35
5 – 9	58.954	8,62	56.157	8,36	115.111	8,49
10 – 14	56.429	8,25	53.393	7,95	109.822	8,10
15 – 19	57.566	8,41	60.708	9,04	118.274	8,72
20 – 24	62.066	9,07	65.597	9,76	127.663	9,42
25 – 29	68.358	9,99	71.080	10,58	139.438	10,28
30 – 34	68.068	9,95	69.307	10,32	137.375	10,13
35 – 39	63.175	9,23	61.969	9,22	125.144	9,23
40 – 44	55.195	8,07	51.859	7,72	107.054	7,90
45 – 49	43.603	6,37	41.640	6,20	85.243	6,29
50 – 54	33.188	4,85	30.140	4,49	63.328	4,67
55 – 59	23.434	3,43	19.034	2,83	42.468	3,13
60 – 64	12.898	1,89	10.703	1,59	23.601	1,74
65 – 69	7.741	1,13	7.703	1,15	15.444	1,14
70 – 74	4.476	0,65	4.875	0,73	9.351	0,69
75+	3.944	0,58	5.820	0,87	9.764	0,72
Total	684.155	100	671.771	100	1.355.926	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2012

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya menggambarkan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk fasilitasi atas pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat. Indikator kinerja makro perlu diungkapkan mengingat indikator ini merupakan perwujudan menyeluruh dan komprehensif atas kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kinerja makro merupakan kinerja yang dihasilkan dari beberapa variabel yang saling terkait antara lain kinerja pemerintah, swasta, dan partisipasi masyarakat. Selain itu capaian indikator makro ini dapat diperbandingkan antar Pemerintah Daerah yang lain, karena umumnya indikator kinerja makro ini juga digunakan secara seragam oleh Pemerintah Daerah lainnya.

Untuk mengukur capaian kinerja makro, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah :

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- Angka Harapan Hidup (AHH);
- Angka Kematian Bayi (AKB);
- Rata-rata Lamanya Sekolah (RLS);
- Angka Melek Huruf (AMH);
- Angka Partisipasi Sekolah (APS).

**TABEL 2.24**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO**

NO	INDIKATOR MAKRO	2010	2011
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		
	a. Atas Dasar Harga Berlaku (jutaan rupiah)	11.615.146,22	13.290.616,88
	b. Atas Dasar Harga Konstan/Th. 2000 (jutaan rupiah)	9.001.742,37	5.853.761,25
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,7	8,84
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	60,00	69,64
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,38	76,01
5	Angka Harapan Hidup / AHH (Tahun)	68,54	68,65
6	Rata-rata Lamanya Sekolah / RLS (Tahun)	10,15	10,80
7	Angka Melek Huruf / AMH (%)	98,15	98,19
8	Angka Partisipasi Sekolah		
	a. APK (Angka Partisipasi Kasar)		
	- SD	113,21	100,59
	- SLTP	68,42	102,70
	- SLTA	78,45	79,90
	b. APM (Angka Partisipasi Murni)		
	- SD	96,11	91,04
	- SLTP	60,23	73,21
	- SLTA	50,83	60,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

Kemudian ada beberapa pandangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan terkait evaluasi pelaksanaan yang dilakukan pada Tahun 2013 diantaranya, pembangunan yang telah dilaksanakan di Tahun 2013 diantaranya infrastruktur jalan lingkungan sudah meningkat yang semula 71,83% sudah mencapai 83,64% dalam bentuk konblok, hal ini sesuai dengan KUAPPAS perubahan Tahun 2012; Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah diantaranya adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan, peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masing-masing yang semula 28,17% menjadi 16,36%; dan dalam penyelesaian aset masih belum tuntas, untuk itu DPRD mendorong kepada Pemerintah Kota agar segera menyelesaikannya meskipun UU 51 Tahun 2008 memberi waktu 5 tahun, karenanya DPRD telah membentuk Pansus Aset yang hasilnya dalam waktu tidak terlalu lama akan membuat rekomendasi kepada Pemerintah Kota.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian misi yang telah ditetapkan, maka pemetaan sasaran beserta capaian dan predikatnya tampak sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

**Tabel 2.25**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Pada Awal RPJMD (2011)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2012)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun (2013)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
				Target RKPd Tahun 2012	Realisasi RKPd Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2013 (%)	
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
WAJIB										
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>										
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Pos Jaga Linmas dalam upaya penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	47	7	10	5	50%	10	12	26%	Kesbangpolinmas
	Jumlah Linmas yang dilatih	3.400	100	600	496	82,72%	600	596	18%	Kesbangpolinmas
	Tersedianya pos jaga di lingkungan pasar	3	0	3	0	0%	3	0	0%	Satpol PP
	Penegakkan PERDA	90%		60%	35 Kegiatan	21%	60%	35 Kegiatan	21%	Satpol PP
Pengembangan wawasan kebangsaan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	30	6	6	6	100%	6	12	40%	Kesbangpolinmas
	Rasio tempat Ibadah persatuan penduduk	1.750	250 berkas	300	0	0%	300	0	0%	Setda
Pendidikan Masyarakat	Politik Kegiatan Pembinaan politik daerah	5.150	200	950	337	35%	950	537	10%	Kesbangpolinmas

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

<b>SOSIAL</b>											
Program Kelembagaan Sosial	Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan masyarakat yang diberdayakan	100%	23%	23%	23%	100%	23%	69%	69%	Dinsosnakertrans
		Jumlah lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang difasilitasi	16 keg	4 keg	4 keg	3 keg	75%	4 keg	7 Keg	44%	Setda
Pembinaan Asuhan/Panti Jompo	Panti	Meningkatnya peran dan fungsi Panti Asuhan/Panti Jompo dalam peningkatan kesejahteraan sosial	100%	0	20%	21%	105%	20%	41%	41%	Dinsosnakertrans
		Meningkatnya sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo di Kota Tangerang Selatan	100%	0	20%	21%	105%	20%	41%	41%	Dinsosnakertrans
Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana Alam	dan Korban	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsosnakertrans
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Trepencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		Prosentase PMKS yang dilatih	100%	5%	15%	15%	100%	20%	40%	40%	Dinsosnakertrans
		Prosentase keluarga miskin yang dilatih	100%	60%	10%	5%	50%	10%	75%	75%	Dinsosnakertrans
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	100%	0%	20%	10%	50%	20%	30%	30%	Dinsosnakertrans
		PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100%	0%	20%	0%	0%	20%	20%	20%	Dinsosnakertrans
Penanggulangan Bencana	Akibat	Prosentase korban bencana yang dievakuasi selama tanggap darurat	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	BPBD
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>											
Pemberdayaan dan Desa	Masyarakat	Cakupan BKM/UPK PNPM	100%	43%	70%	70%	100%	70%	33%	47%	BPMPP - KB

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Cakupan Pengelolaan SDA	7 Kec	Lokasi Kecamatan Setu	2 Kec	1 Kec	50%	2 Kec	2 Kec	25%	BPMPP - KB
	Cakupan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat	7 Kec	3	7	3	43%	7	2	25%	BPMPP - KB
	Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga	7 Kec	50%	50	0	0%	60	12,5	21%	BPMPP - KB
Peningkatan masyarakat membangun desa	partisipasi dalam Prosentase Posyandu Aktif	60%	32%	40%	40	100%	52%	60%	100%	BPMPP - KB
	PKK Aktif	62%	32%	25%	25	100%	25%	62	100%	BPMPP - KB
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga perbedayaan masyarakat (LPM)	75 LPM	54 LPM	54 LPM	54 LPM	100%	54 LPM	54 LPM	100%	BPMPP - KB
	Rata-rata jumlah kelompok binaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	100%	38 KPM	20%	20%	100%	20%	0	0%	BPMPP - KB
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										
Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	IPG 75%;IDG 60%	17,77% dilembaga legislatif,6.66% eselon II	IPG 68%;IDG 55%	Legislatif 18% dan Ess. II 5%	0%	IPG 68%;IDG 55%	74.17%	55%	BPMPP - KB
Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Pembinaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	75%	10%	30%	20%	80%	40%	31%	23%	BPMPP - KB
Peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	50%	60%	85%	0%	60%	93,75	94%	BPMPP - KB
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	20%	30%	23%	0%	30%	40,62	81%	BPMPP - KB
	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100%	15%	50%	14%	0%	50%	18,75	19%	BPMPP - KB

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

	kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT/ PKT di rumah sakit										
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>											
Peningkatan peran serta pemuda	Jumlah organisasi kepemudaan	26 organisasi	4 organisasi	26 organisasi	4 organisasi	15%	26 organisasi	8 organisasi	31%	Dispora	
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	16 keg	0	4 kegiatan	2 Kegiatan	50%	4 kegiatan	2 kegiatan	13%	Dispora	
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah kegiatan penyuluhan narkoba	1.200 Pemuda	0	150 Pemuda 1 Kecamatan	100 Pemuda	75%	150 Pemuda 1 Kecamatan	100 Pemuda	8,33%	Dispora	
Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga	21 cabang olahraga	0	5 cabang olahraga	5 cabang olahraga	100%	5 cabang olahraga	5 Cabang olahraga	23,81%	Dispora	
	Pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga (Penyelenggaraan kompetisi olahraga yang diikuti 54.000 atlet)	36.000 atlet	0	9000 atlet	3000 atlet	33%	9000 atlet	9000 atlet	23,68%	Dispora	
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Prosentase lapangan olahraga	7 kec		1 kec	0 kec	0%	1 kec	0	0%	Dispora	
<b>KEBUDAYAAN</b>											
Pengembangan nilai budaya	Jumlah gedung serbaguna (kesenian, dll) yang terbangun	100%	0	30%	13%	43%	30%	13%	13%	Kantor Kebudayaan dan Pariwisata	
Pengelolaan kekayaan budaya	Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Tangerang Selatan	100%	0%	50%	48%	96%	50%	48%	48%	Kantor Kebudayaan dan Pariwisata	
<b>PENATAAN RUANG</b>											
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya RTH yang tertata	100%	9,9%	20%	7%	35%	20%	29,9%	29,9%	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	
Perencanaan tata ruang	Tersedianya informasi mengenai perencanaan ruang	11 dok, 6 Perda	0	5 dokumen	6 dokumen	120%	5 dokumen	6 dokumen	54,55%	Dinas Tata Kota dan Bangkim	
Kebijakan Pemanfaatan Ruang	Tersedianya kebijakan pemanfaatan ruang sesuai fungsi kota	12 dok, 3 Perda	1 dokumen		0 dokumen	0%		0	0%	Dinas Tata Kota dan Bangkim	

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Pengendalian Ruang	Pemanfaatan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 5 hari kerja	100%	0	25%	24%	96%	25%	25%	25%	Dinas Tata Kota dan Bangkim
		Jumlah arahan/kebijakan/regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang kota dan bangunan	7 Kec.	0	-	7 Kec.	100%	-	7 Kec.	100%	Dinas Tata Kota dan Bangkim
		Prosentase terbangunnya gedung pusat pemerintahan	100%	0	-	0	0%	-	0	0%	Dinas Tata Kota dan Bangkim
		Prosentase gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan yang layak	100%	0	100%	0	0%	100%	0	0%	Dinas Tata Kota dan Bangkim
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>											
Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Kinerja	Persentase penanganan sampah	80%	20%	20%	20%	100%	20%	40%	50%	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
		Jumlah komunitas yang terlibat dalam pengelolaan persampahan (PSBM)	7 Kec	20%	7 Kec	0%	0%	7 Kec	0	0%	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
		Pengelolaan sampah kerja sama Swasta dan daerah sekitar ( TPS Regional)	4 dokumen	0%	0	0%	0%	0	0	0%	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
		Penanganan sampah perkotaan	100%		60%	60%	100%	60%	60%	60%	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pencemaran	Penegakkan hukum lingkungan	90%		80%	80%	100%	80%	80%	90%	BLHD
		Terlayannya pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup	90%		0%	57%	63%	0%	57%	63%	BLHD
Pengendalian dan pengawasan sumber daya alam	pemanfaatan	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100 perusahaan		100 perusahaan	0	0%	100 perusahaan	0	0%	BLHD
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Meningkatnya upaya reservasi air			188 sumur resapan dan 10.000 lubang biopori	9%	9%	188 sumur resapan dan 10.000 lubang biopori	9%	9%	BLHD



## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

	Meningkatnya rehabilitasi SDA	45%		5%	5%	100%	5%	5%	45%	BLHD
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA	Meningkatnya peran serta sekolah, LSM, pihak swasta serta masyarakat lainnya tentang pengelolaan lingkungan hidup	1200 org		200 org	0	0%	200 org	0	0%	BLHD
<b>PEKERJAAN UMUM</b>										
Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	70%	(Panjang jalan dalam kondisi baik/Panjang jalan seluruhnya)x100%	50%	50%	100%	50%	50%	71%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pengembangan, Pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Prosentase jaringan sungai dan anak sungai yang berkondisi baik	60%	(Panjang jaringan sungai dalam kondisi baik/Panjang jaringan sungai seluruhnya)x100%	35%	35%	100%	35%	35%	58%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase panjang saluran drainase dan gorong-gorong yang berkondisi baik	60%	(Panjang saluran/drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik/Panjang saluran/drainase/gorong-gorong seluruhnya)x100%	40%	40%	100%	40%	40%	67%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
<b>PERHUBUNGAN</b>										
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpelihara dan terehabilitasinya prasarana dan fasilitas LLAJ	° Terehabilitasi rambu-rambu lalu lintas sebanyak 196 unit; ° Terehabilitasi rambu RPPJ sebanyak 110 Unit;	° Jumlah rambu-rambu lalu lintas rusak sebanyak 156 unit; ° Jumlah RPPJ yang rusak sebanyak 100	° Terehabilitasi rambu-rambu lalu lintas sebanyak 50 unit; ° Terehabilitasi rambu RPPJ sebanyak 40 Unit;	4 titik rambu & rehabilitasi 3 kecamatan	51%	° Terehabilitasi rambu-rambu lalu lintas sebanyak 50 unit; ° Terehabilitasi	51%	50%	Dishubkominfo

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

		° Terehabilitasi nya 25 titik simpang	unit; °Jumlah traffic light yang rusak sebanyak 15 titik simpang; ° 1 unit gedung pengujian kendaraan bermotor eks Kabupaten Tangerang Rusak	° Terehabilitasi nya 5 titik simpang			nya RPPJ sebanyak 40 Unit; ° Terehabilitasi nya 5 titik simpang			
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan rambu-rambu	° RPPJ 161 Unit; ° Traffic Light 6 titik lokasi; ° Rambu-rambu lalu lintas 834 Unit; °Cermin tikungan 66 Unit; °Traffic cone/barrier 180 Unit; °Marka jalan 23.220 m2; ° Pengadaan / Pemasangan CCTV 19 Unit	° Jumlah rambu-rambu lalu lintas saat tersedia 642 unit; ° Jumlah RPPJ saat ini tersedia 96 unit; ° Jumlah marka jalan saat ini tersedia 102,5m2; °Belum tersedianya mobil tangga dan mobil derek	° RPPJ 10 Unit; ° Traffic Light 1 titik lokasi; ° Rambu-rambu lalu lintas 40 Unit; °Cermin tikungan 6 Unit; °Traffic cone/barrier 50 Unit; °Marka jalan 4000 m2; °Mobil tangga 1 Unit; °Mobil derek 1 Unit; °F/S dan DED Titik Lokasi CCTV serta Pengadaan/Pem asangan CCTV 3 Unit	83%	83%	° RPPJ 10 Unit; ° Traffic Light 1 titik lokasi; ° Rambu- rambu lalu lintas 40 Unit; °Cermin tikungan 6 Unit; °Traffic cone/barrier 50 Unit; °Marka jalan 4000 m2; °Mobil tangga 1 Unit; °Mobil derek 1 Unit; °F/S dan DED Titik Lokasi CCTV serta Pengadaan/P emasangan CCTV 3 Unit	Rambu lalu- lintas 50 unit * Marka jalan 4.584M * Terpasangnya paku jalan 144 buah * Sosialisasi kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini 14 Sekolah * Sosialisasi Zona Selamat Sekolah 1 Sekolah * Marka dan Rambu Zona Selamat Sekolah 1 Paket	37%	Dishubkominfo
Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Pengembangan sistem angkutan masal perkotaan	3 kegiatan	0	0	4 Kegiatan	133%	0	4 Kegiatan	133%	
Peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah uji kir angkutan umum	° Terlayannya uji kendaraan	32.500 Unit kendaraan	° Terlayannya uji kendaraan	* Peningkatan Pelayanan KIR	75%	° Terlayannya	° Terselenggara nya	24%	Dishub kominfo

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

		bermotor dalam 5 tahun sebanyak 244.000 unit; ° Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan	bermotor yang di uji	bermotor sebanyak 35.000 unit; ° Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan	sebanyak 26.250 Unit kendaraan bermotor		uji kendaraan bermotor sebanyak 35.000 unit; ° Pengawasan dan pengendalian angkutan barang dan umum di 7 Kecamatan	pelayanan KIR terhadap 58.750 unit kendaraan bermotor		
	Jumlah titik rawan macet	titik rawan kemacetan lalu lintas berkurang menjadi 25 titik	50 titik rawan kemacetan lalu lintas	45 titik rawan kemacetan lalu lintas	*Operasi Gatur Lalin di 50 titik rawan macet	100%	45 titik rawan kemacetan lalu lintas	Pengendalian operasional titik kemacetan sebanyak 9 titik	16,48%	Dishubkominfo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	1 gedung terminal tipe A Ciputat dengan luas 6 Ha; Halte sebanyak 11 Unit	Belum tersedianya fasilitas terminal angkutan umum		0	0%		0	0%	Dishubkominfo
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya tower bersama	Tersedianya tower bersama sebanyak 219 unit	Belum tersedianya tower bersama	Penyusunan Peraturan Walikota mengenai penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama	0	0%	Penyusunan Peraturan Walikota mengenai penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama	0	0%	Dishubkominfo
	Pengaturan penggunaan frekuensi pemancar radio	Terkendalinya frekuensi radio	Belum terkendalinya frekuensi radio	-	0	0%	-	0	0%	Dishub kominfo

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

<b>PERUMAHAN</b>										
Pengembangan infrastruktur permukiman	Rumah layak huni	Tersebar di 7 Kec.		Tersebar di 7 Kec.	0	0%	Tersebar di 7 Kec.	0	0%	Dinas Tata Kota dan Bangkim
Lingkungan Perumahan Sehat	Persentase rumah tinggal bersanitasi			Tersebar di 7 Kec.	0	0%	Tersebar di 7 Kec.	0	0%	Dinas Tata Kota dan Bangkim
Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU	Prosentase pemasangan PJU di lokasi Strategis	100%	0%	20%	20%	100%	20%	20%	20%	Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman
	Terpeliharanya lampu PJU yang telah terpasang	100%	0%	20%	0	0%	20%	0	0%	Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	15 unit mobil damkar	1 unit 5000 ltr	2 unit mobil damkar 3000 ltr dan 2 unit mobil damkar 5000 ltr	0	0%	3 unit mobil damkar 3000 ltr dan 1 unit mobil damkar 10000 ltr	5 Unit mobil damkar 3000 liter, 3 unit mobil damkar 5000 liter, 1 unit mobil damkar 10000 liter	22,5%	Kantor Pemadam Kebakaran
		1 unit mobil tangga	-	-	0	0%	1 Unit mobil tangga	1 Unit mobil tangga	0%	Kantor Pemadam Kebakaran
		4 unit mobil water Supply	-	1 unit mobil water suply	0	0%	1 unit mobil water suply	1 Unit mobil water suply	25%	Kantor Pemadam Kebakaran
		2 unit mobil paramedis	-	1 unit mobil paramedis	0	0%	1 unit mobil paramedis	2 unit mobil paramedis	0%	Kantor Pemadam Kebakaran
		1 unit mobil rescue	-	1 unit mobil resque	0	0%	1 unit mobil resque	1 unit mobil resque	0%	Kantor Pemadam Kebakaran
		3 paket equipment damkar dan rescue	-	1 Paket equipment damkar dan rescue	0	0%	1 Paket equipment damkar dan rescue	2 Paket equipment damkar dan rescue	0%	Kantor Pemadam Kebakaran
	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional maupun kendaraan pemadam kebakaran	14 unit mobil damkar, 3 unit mobil water supply, 2 unit mobil paramedis, 3 unit mobil	-	4 Unit mobil damkar, 1 unit mobil water supply dan 2 unit kendaraan operasional	4 mobil damkar, 1 unit mobil water suply dan 2 unit kendaraan operasional	100%	4 Unit mobil damkar, 1 unit mobil water supply dan 2 unit kendaraan	4 unit mobil damkar, 1 unit mobil water suply dan 2 unit kendaraan	100%	Kantor Pemadam Kebakaran

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

		operasional dan 1 unit mobil tangga					operasional	operasional		
	Penyusunan masterplan sistem proteksi kebakaran	1 dokumen sistem proteksi kebakaran, 11 dok pencegahan kebakaran	-	2 dokumen	1 Dokumen	50%	2 dokumen	3 dokumen	33,33%	Kantor Pemadam Kebakaran
Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	100%	0%	30%	Pemeliharaan TPU 20 lokasi, Pembangunan TPU 4 Lokasi	0%	30%	Pemeliharaan TPU 20 lokasi, Pembangunan TPU 4 Lokasi	20,78%	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
<b>PENDIDIKAN</b>										
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio Murid per Kelas	1:32	1 : 65	1 : 60	1:63	100%	1 : 60	1:63	100%	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah	0,5%	0,43%	0,30%	0,35%	100%	0,30%	0,35%	100%	Dinas Pendidikan
	Prosentase Lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)	99%	95%	98%	97%	100%	98%	97%	100%	Dinas Pendidikan
	Prosentase Lulusan SMP melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas(SMP)/Madrasah Aliyah (MA)	99%	99%	99%	99%	100%	99%	99%	100%	Dinas Pendidikan
	Jumlah siswa terutama siswa miskin penerima BOS	11200 siswa miskin	11200 siswa miskin	2306 siswa miskin	*Fasilitasi Penyaluran BOS sebanyak 344 Siswa	50%	2306 siswa miskin	11,544 Siswa Miskin	103%	Dinas Pendidikan
	Penyediaan bantuan BOS jenjang SD dan SMP			4 paket	0	0%	4 paket	0	0%	
	Subsidi untuk pemeliharaan gedung sekolah	240 lokal	1333 lokal ruang kelas	240 lokal	0	0%	240 lokal	0	0%	Dinas Pendidikan
	Pengembangan gedung sekolah yang murah dan mudah pemeliharaannya	208 gedung sekolah	208 gedung sekolah	41 sekolah	0	0%	41 sekolah	0	0%	Dinas Pendidikan
Pendidikan Menengah	Rasio Murid per Kelas	1:32	1:40	1:38	1:40	100%	1:38	1:40	100%	Dinas Pendidikan

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

	Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SMA			1 paket	0	0%	1 paket	0	0%	
	Angka Putus Sekolah	0,10%	1,5%	1%	1,5%	100%	1%	1,5%	100%	Dinas Pendidikan
	Cakupan siswa terutama siswa miskin penerima BOS	200 siswa miskin	1400 siswa miskin	200 siswa miskin	200 Siswa	100%	200 siswa miskin	200 Siswa	100%	Dinas Pendidikan
	Prosentase lulusan SMA/ MA melanjutkan ke perguruan tinggi	90%	75%	85%	85%	100%	85%	85%	100%	Dinas Pendidikan
	Prosentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya	85%	35%	55%	40%	100%	55%	75%	88%	Dinas Pendidikan
Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah peserta kelompok belajar A, B, C	1396 org	245 org	320 org	245 org	100%	320 org	490	35%	Dinas Pendidikan
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Guru SD/SMP/SMA,SMK memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi	sisa 2107 guru sudah bersertifikasi	jumlah pendidik/guru 3715 org, guru yang sudah bersertifikasi 1608 pendidik	sertifikasi pendidik 666 org guru	Sertifikasi pendidik 666 org guru	100%	sertifikasi pendidik 666 org guru	jumlah pendidik/guru 4381 org, guru yang sudah bersertifikasi 1608 pendidik	85%	Dinas Pendidikan
<b>PERPUSTAKAAN</b>										
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	100%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	40%	Kantor Perpustakaan
	Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	5500 judul	2324 Judul	1647 Judul	1647 Judul	100%	1000 Judul	4971 Judul	90,38%	Kantor Perpustakaan
<b>KESEHATAN</b>										
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masy. Miskin (Jamkesda)	16680 pasien	12510 Pasien	13344 pasien	2086 pasien	16,67%	13344 pasien	14598 pasien	86%	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin sebesar 100 %	100%	0	80%	0	0%	80%	0	0%	RSU
Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	30 pkm	25 pkm	25 pkm	25 pkm	100%	25 pkm	25 pkm	83%	Dinas Kesehatan
Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan penggunaan obat	90%	75%	80%	75%	100%	80%	75%	83%	Dinas Kesehatan
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4	97%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	98%	Dinas Kesehatan

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	81%	76%	77%	76%	100%	77%	76%	94%	Dinas Kesehatan
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91%	87%	88%	87%	100%	88%	87%	96%	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap)	91%	87%	88%	0%	0%	88%	0%	0%	Dinas Kesehatan
	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	86%	81%	82%	81%	100%	82%	81%	92%	Dinas Kesehatan
	Cakupan kunjungan bayi	91%	85%	86%	0%	0%	86%	0%	0%	Dinas Kesehatan
	Cakupan pertolongan persalinan di RS oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	40%	60%	0%	0%	60%	0%	0%	RSU
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan anak balita	87%	80%	81%	80%	100%	81%	80%	92%	Dinas Kesehatan
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	85%	86%	85%	100%	86%	85%	85%	Dinas Kesehatan
Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln	100%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
Promosi dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kader kesehatan	6000	5000	5000	5000	100%	5000	5000	100%	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif		80%	85%	80%	95%	85%	80%	80%	Dinas Kesehatan
Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana layanan kesehatan	Rasio posyandu per satuan balita	100	177		0	0%		0	0%	Dinas Kesehatan
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan	100%	7%	60%	25%	21%	60%	32%	32%	Dinas Kesehatan
	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	30%	70%	30%	21%	70%	60%	60%	RSU
Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit	Kebutuhan obat RS terpenuhi sebesar 100%	100%	30%	75%	0	0%	75%	0	1%	RSU

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	80%		80%	0%	0%	80%	0%	36%	Dinas Kesehatan
	Penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular 100% sesuai standar	100%	45%	65%	55%	90%	65%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	% ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (MDGs)	100%	0%	80%	0%	0%	80%	0%	0%	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	95%	45%	60%	55%	92%	60%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Tertanggulangnya kasus KLB < 24 jam	100	90	100	100	100%	100	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Penanganan penyakit menular 70%	85%	0	0	0	0%	0	0	0%	RSU
Pengembangan lingkungan sehat	Prosentase pemukiman sehat	80%	40%	75%	70%	100%	75%	110%	138%	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di RS	100%	0	70%	0	0%	70%	0%	0%	RSU
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS	100%	20%	60%	20%	100%	60%	40%	40%	RSU
<b>KELUARGA BERENCANA DAN SEJAHTERA</b>										
Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun	2,00%	3,75%	3,50%	4,18%	100%	3,25%	4%	100%	BPMPP - KB
	Unmet Need (cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi)	12%	18%	15%	18,00%	100%	10%	15%	100%	BPMPP - KB
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) br-KB	88,00%	76%	78,50%	93,00%	100%	80,00%	93%	100%	BPMPP - KB
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	82,0%	72%	75,0%	91%	100%	75,30%	91%	100%	BPMPP - KB



## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	84,0%	73%	75,0%	88%	100%	78,00%	88%	100%	BPMPP - KB
	Kesehatan Reproduksi Remaja	25%	PIK Tumbuh 32, Tegak 1, Tegar 1	10%	11%	100%	15%	11%	73%	BPMPP - KB
	Pravalensi Peserta KB aktif	75%	60,00%	62,50%	73%	100%	65,00%	73%	100%	BPMPP - KB
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	7,50%	20,00%	18%	18%	100%	15%	18%	100%	BPMPP - KB
	Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan	160 Orang	25 Org	88 Orang	25 orang	28%	95 Orang	25 orang	26,3%	BPMPP - KB
	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi penunjang pelayanan KB	30%	Nihil	10%	32,2	100%	15%	32%	100%	BPMPP - KB
<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>										
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang difasilitasi oleh pemda	100% (64 unit)	12.533 unit UMKM sampai awal 2011	16%	0	0%	16%	0	0%	Dinas Koperasi dan UKM
	Jumlah Usaha Mikro Kecil atau sektor informal (K5, asongan) yang memperoleh bantuan	Terfasilitasi UMKM/sector informal 786 unit	s.d thn 2011=411 unit	75 unit	0	0%	75 unit	0	0%	Dinas Koperasi dan UKM
	Terfasilitasinya pengembangan sentra-sentra potensial UMKM	Tumbuh dan berkembangnya 5 sentra unggulan Tangsel	2 rintisan sentra (kranggan dan pondok aren)	1 sentra	0	0%	1 sentra	0	0%	Dinas Koperasi dan UKM
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UMKM	Tumbuhnya UMKM sebanyak 1200 unit	12.533 unit UMKM sampai awal 2011	2-3%	0	0%	2-3%	0%	0%	Dinas Koperasi dan UKM
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif	$\Sigma$ koperasi aktif = 381 unit	th 2011 jml kop total 407 unit, kop aktif 281 unit	5%	0	0%	5%	0	0%	Dinas Koperasi dan UKM

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

<b>KETENAGAKERJAAN</b>										
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	20%	0%	15%	15%	100%	15%	30%	150%	Dinsosnakertrans
Peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	20%	10%	15%	15%	100%	15%	40%	200%	Dinsosnakertrans
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenegekerjaan	Angka penyelesaian sengketa pengusaha - pekerja pertahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsosnakertrans
<b>KETRANSMIGRASIAN</b>										
Program Transmigrasi Regional	% transmigrasi Swakarsa	20%	15%	15%	15%	15%	15%	45%	225%	Dinsosnakertrans
<b>PERDAGANGAN</b>										
Peningkatan dan pengembangan ekspor	Ekspor Bersih perdagangan	60%	0	3	0	0%	3	0	0%	Disperindag
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase kasus pengaduan konsumen yang terselesaikan	30%	0%	15%	0%	0%	15%	0%	0%	Disperindag
Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal	24	0	3	0	0%	3	0	0%	Disperindag
<b>PARIWISATA</b>										
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	20.000 org		20.000 org	0	0%	20.000 org	0	0%	Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi	Rencana Induk Pariwisata	1 Paket Software Aplikasi dan Pemeliharaan Berkala	-	1 Paket Software Aplikasi RIPDA Tangerang Selatan	0	0%	1 Paket Software Aplikasi RIPDA Tangerang Selatan	0	0%	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
	Penataan dan pengembangan wisata belanja (Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Ciputat Timur)	4 Lokasi Wisata Kuliner di 4 Kecamatan	-	1 Kali	0	0%	1 Kali	0	0%	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
	Pengembangan rekreasi dan wisata alam (Sungai Cisadane, dan Situ Gintung, Situ Ciledug, Rawa Kutuk)	4 Lokasi	-	1 Kali	0	0%	1 Kali	0	0%	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

<b>PERTANIAN</b>										
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi hasil pertanian	50%	0%	10%	7%	77%	20%	27%	4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Cakupan bina kelompok tani	50%	6%	16%	16%	100%	26%	48%	3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan bina kelompok peternak 75%	75%	0%	15%	15%	100%	30%	45%	3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Produksi hasil peternakan	50%	0%	10%	10%	100%	20%	30%	3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>										
Pengembangan Budidaya Perikanan	Prosentase produksi perikanan	60%	10%	20%	20%	100%	30%	60%	3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan	Cakupan bina POKDAKAN, UPR dan Kelompok Pengolah	100%	0%	20%	20%	100%	40%	60%	3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>KETAHANAN PANGAN</b>										
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penguatan cadangan pangan	60%	40%	40%	40%	100%	45%	125%	3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	50%	50%	50%	100%	60%	160%	3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Regulasi ketahanan pangan	3 dok	0 dokumen PERDA / PERWAL	Ada	0%	0%	Ada	0%	0%	Setda
<b>PENANAMAN MODAL</b>										
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	5 Pameran/ tahun	0	5 Pameran	5 Pameran	100%	5 Pameran	2 Pameran	40%	KPMD
	Peraturan Daerah tentang Investasi	1 dok	0 dokumen PERDA / PERWAL	1 dok			1 dok	0	0%	Setda
Kebijakan Pengembangan potensi Unggulan Daerah	Tersusunnya kajian dan kebijakan tentang Potensi Unggulan daerah	3 dok	0 dokumen PERDA / PERWAL	1 dok	0%		1 dok	0	0%	Setda

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014**

<b>INDUSTRI</b>											
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah produk berbasis Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan HAKI	60	belum ada	5	0	0%	5	0	0%	Disperindag	
	Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin Industri Kecil dan Menengah	35	belum ada	3	0	0%	3	0	0%	Disperindag	
<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>											
Penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	65%	15%	35%	43,89%	105%	45%	15%	15%	Disdukcapil	
	Rasio pasangan berakte nikah	75%	5%	25%	139,79%	114%	45%	20%	20%	Disdukcapil	
	Rasio bayi berakte kelahiran	75%	5%	15%	42,16%	113%	40%	25%	25%	Disdukcapil	
<b>PERTANAHAN</b>											
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terwujudnya fasilitasi tahapan pelaksanaan pengadaan tanah	37	-	5	0	0%	5	0	0%	Setda	
	Terciptanya pengamanan tanah aset pemerintah	100	-	50	0	0%	50	0	0%	Setda	
	Jumlah Perwal ttg pengamanan tanah aset	1	-	1	0	0%	1	0	0%	Setda	
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>											
Pengembangan data/informasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	52	11	13	11	85%	13	22	42%	Bappeda	
	Pengendalian kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan Non APBD	33 dokumen	12 dok realisasi fisik - keu, 4 dok realisasi PBJ, 2 dok rencana PBJ	3 dokumen	30	273%	3 dokumen	63 dokumen	100%	Setda	
	Jumlah rekomendasi rumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan	15 rekom	4 kali rapat evaluasi, 4 kali rakor dalbang	3 rekom	4 dokumen	133%	3 rekom	4 dokumen	27%	Setda	
Kerjasama Pembangunan	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan dengan wilayah	6	1	1	0	0%	1	0	0%	Bappeda	

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

	perbatasan										
	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor	11 keg	11	11	0	0%	11	0	0%	Bappeda	
Perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada			Ada	100%		0	0%	Bappeda	
	Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Menengah yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada			Ada	100%		0	0%	Bappeda	
	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada		Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Bappeda	
	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	0%	20%	20%	100%	20%	20%	20%	Bappeda	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan Jasa Kosntruksi	17%	0	10%	10%	100%	10%	10%	59%	Setda	
<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>											
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya Perda Kota Tangerang Selatan	69 Perda (100%)	12 Perda	14%	15%	107%	14%	30%	30%	Sekretariat Dewan	
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Fasilitasi kegiatan lingkup Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	0	0%	100%	0%	0%	Setda	
Kerjasama informasi dan media massa	Publikasi informasi pembangunan daerah melalui media massa	100%		20%	0	0%	20%	3%	15%	Setda	
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	100 Raperda dan 500 Perwal	6 Raperda	15 Raperda dan 100 Perwal	10%	100%	15 Raperda dan 100 Perwal	4 Raperda	27%	Setda	
Peningkatan kapasitas lembaga RT dan RW	Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada RT dan RW	680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel		680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat desa/kel	0	0%	680 RW; 3.470 RT; 288 perangkat	0	0%	Setda	

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

							desa/kel				
Penataan organisasi penyelenggara pemerintahan daerah	Terciptanya Penataan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru	20%	0%	50%	0	0%	50%	0%	0%	Setda	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP pada SKPD	20%	-	10%	0	0%	10%	0%	0%	Setda	
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD di lingkungan Kota Tangerang Selatan	20%	-	15%	0	0%	15%	0%	0%	Setda	
	Jumlah tapal batas wilayah administratif antar daerah	96 tugu batas	-	24 tugu batas	0	0%	24 tugu batas	0%	0%	Setda	
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase komposisi belanja langsung terhadap APBD sebesar 60 %	100%	49,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKAD	
	Cakupan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	100%	Seluruh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKAD	
	Prosentase target pendapatan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKAD	
	Persentase aset daerah yang diadministrasikan	Distribusi dan Pemanfaatan aset daerah 10 %	0%	Inventarisasi dan distribusi aset daerah 20 %	100%	100%	Inventarisasi dan distribusi aset daerah 20 %	100%	100%	DPPKAD	
	Cakupan pengelolaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Setda	
	Jumlah dokumen Standarisasi Harga Satuan	2 dok	1 PERWAL tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa 2010	2 dok	1 dok	50%	2 dok	1 dok	50%	Setda	
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah peserta diklatpim	3.688		805	177	21,99%	805	40	4,97%	BKPP	
Pendidikan Kedinasan	Jumlah peserta diklat kedinasan	260		120	370	308,33%	40	30	75%	BKPP	

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pengembangan e-procurement	50%	50%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	Setda
	Sistem informasi Pemerintah Daerah	15%	-	10%	0%	0%	10%	0%	0%	Setda
	Pelayanan Perijinan Online	99 %		98 %	100%	100%	98 %	100%	100%	BP2T
Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi LPPD	6		1	0	0%	1	0	0%	Setda
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan kegiatan yang bersumber pada dana pusat atau provinsi	6	1	1	0	0%	1	0	0%	Setda
	Terealisasinya Laporan Hasil Pemeriksaan	360 LHP	64 LHP	72 LHP	142 LHP	197%	72 LHP	30 LHP	42%	Inpektorat
	Tertanganinya Kasus Litigasi dan Non Litigasi	6 dokumen	-	dokumen	0	0%	dokumen	0	0%	Setda
Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa	Terselenggaranya pembinaan pegawai	95%	20%	70%	50%	71,43%	80%	70%	74%	Sekretariat Korpri
<b>KEARSIPAN</b>										
Pengembangan sistem admnistrasi kearsipan	Meningkatnya sistem informasi arsip elektronik/digital	100%	50%	20%	14%	70%	10%	74%	74%	Kantor Arsip
Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	Prosentase penyelamatan dan pelestariann dokumen/arsip daerah	92%	17%	20%	14%	70%	16%	47%	51%	Kantor Arsip
Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kearsipan	100%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	60%	Kantor Arsip

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Tema Musrenbang RKPD Tahun 2014 ini adalah **“Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**. Seperti pada tahun sebelumnya, Kota Tangerang Selatan masih menghadapi 7 (tujuh) permasalahan pokok yang menjadi masalah mendesak di Kota Tangerang Selatan, yaitu:



Permasalahan utama yang menjadi isu strategis dan masalah mendesak adalah sebagai berikut:

- **Kemiskinan dan pengangguran;**
- **Sumber daya manusia;**
- **Perekonomian daerah;**
- **Infrastruktur dasar dan kawasan perkotaan;**
- **Tata kelola pemerintahan.**



Isu **(A) kemiskinan dan pengangguran** ini terkait dengan perluasan lapangan pekerjaan, termasuk didalamnya penguatan serta pengembangan usaha berbasis masyarakat. Isu **(B) sumber daya manusia** ini terkait dengan peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Tangerang Selatan sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Isu **(C) perekonomian daerah** ini terkait dengan pengembangan Kota Tangerang Selatan sebagai kota perdagangan dan jasa serta peningkatan iklim investasi. Isu **(D) infrastruktur dasar dan kawasan perkotaan** ini terkait dengan penataan jaringan jalan dan infrastruktur dasar lainnya, serta pelestarian lingkungan. Dan isu **(E) tata kelola pemerintahan** ini terkait dengan peningkatan layanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi.

Ada beberapa pandangan dari DPRD Kota Tangerang Selatan mengenai perkiraan permasalahan pembangunan pada Tahun 2014 yang disampaikan ketika pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2013, diantaranya:

- a) Permasalahan yang paling krusial adalah pada bidang kesehatan dimana mahalnya biaya pengobatan yang terindikasi dari maraknya masyarakat lebih memilih pengobatan alternatif dan birokrasi yang masih dianggap sulit oleh masyarakat tidak mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan gratis atau Jamkesmas;
- b) Mahalnya biaya pendidikan pada sekolah tertentu (Sekolah favorit);
- c) Tempat pembuangan sampah yang belum tuntas ;
- d) Pembangunan jalan dan perbaikan/perawatan jalan yang belum optimal terkesan perencanaan kurang baik, utamanya jalan-jalan lingkungan warga, atau jalan alternatif menuju jalan protokol semakin tinggi;
- e) Belum tersediaannya lapangan pekerjaan yang cukup, guna menampung angkatan kerja yang semakin tinggi. Hal ini apabila tidak segera ditanggulangi akan berdampak pada tindakan kriminalitas di Kota Tangerang Selatan semakin tinggi;
- f) Pembinaan kepemudaan sebagai generasi penerus tidak optimal, indikatornya adalah kurangnya kegiatan positif baik olahraga maupun kesenian yang bersifat lokal di Kota Tangerang Selatan guna membangkitkan rasa nasionalisme dan kesetiakawanan nasional dikalangan pemuda.

Untuk mengatasi 7 (tujuh) permasalahan pokok seperti diatas, dirumuskan 7 (tujuh) prioritas pembangunan untuk Tahun 2014 yang mengacu kepada RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016, yaitu:

- 1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar;**
- 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;**
- 3. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;**
- 4. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah;**
- 5. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;**
- 6. Peningkatan Ketahanan Pangan;**
- 7. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.**

Kemampuan keuangan daerah tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan semua permasalahan sekaligus, sehingga harus disusun berdasarkan skala prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2014 dan bantuan keuangan atau bantuan pembangunan kepada Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat. Isu strategis Kota Tangerang Selatan yang masuk ke dalam RPJMD Provinsi Banten, yaitu:

1. Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD – Serpong - Parung, rencana pembangunan Flyover Alam Sutera dan Flyover SMS;
3. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong – Ciputat - Simpang Gablek - Sawangan;
4. Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan dan penataan ulang U Turn;
5. Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan dan interkoneksi drainase permukiman dengan drainase kota;
6. Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan;
7. Percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan - Bandara Soekarno-Hatta;
8. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ciputat dan Ruang Terbuka Hijau;
9. Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron;
10. Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur bangunannya kearah vertikal;
11. Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis dan revitalisasi pasar-pasar tradisional.

**2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.**

**A. Kemiskinan dan Pengangguran.**

Jumlah penduduk yang berpendapatan terendah di Kota Tangerang Selatan masih cukup banyak hak tersebut dapat dilihat berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2010 dan berdasarkan basis data terpadu PPLS Tahun 2011 sebanyak 88.544 jiwa. Angka tersebut dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok 1 paling miskin, kelompok 2 hampir miskin dan kelompok 3 rentan miskin. Jika dihitung berdasarkan prosentase dengan jumlah penduduk tahun 2011 adalah sebesar 6,59%. Total jumlah penduduk yang berpendapatan terendah paling banyak di Pamulang yaitu sebanyak 24.868 jiwa, sedangkan paling sedikit di Serpong Utara yaitu sebanyak 5.256 jiwa. Karena itu, pengurangan beban masyarakat yang mempunyai pendapatan terendah (penerima BLT) dalam pembiayaan pendidikan (terutama tingkat dasar) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih harus diprioritaskan. Artinya masih ada beberapa penduduk yang masih harus ditingkatkan kesejahterannya.

**Tabel 2.26**

**Kondisi kesejahteraan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012**

Nama Kecamatan	Jumlah Individu			TOTAL
	Kelompok 1 (paling miskin)	Kelompok 2 (hampir miskin)	Kelompok 3 (rentan miskin)	
SETU	2,075.00	3,268.00	2,597.00	7,940.00
SERPONG	1,998.00	3,341.00	2,915.00	8,254.00
PAMULANG	5,071.00	9,541.00	10,256.00	24,868.00
CIPUTAT	4,456.00	6,254.00	4,860.00	15,570.00
CIPUTAT TIMUR	2,509.00	4,487.00	4,013.00	11,009.00
PONDOK AREN	4,441.00	6,326.00	4,880.00	15,647.00
SERPONG UTARA	1,475.00	1,990.00	1,791.00	5,256.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,025.00</b>	<b>35,207.00</b>	<b>31,312.00</b>	<b>88,544.00</b>
<b>% thd jumlah penduduk 2011</b>	<b>1.64</b>	<b>2.62</b>	<b>2.33</b>	<b>6.59</b>

Sumber: Data terpadu PPLS Tahun 2011

Aktivitas perekonomian menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang tinggi rendahnya ditandai dengan jumlah fasilitas perdagangan dan jasa. Fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia berupa pasar, baik modern maupun tradisional, bank, BPR, KUD/koperasi, kompleks ruko dan minimart. Pasar tradisional yang terdapat di tanah milik pemerintah daerah adalah sebanyak 6 unit, yaitu Pasar Ciputat, Pasar Ciputat Permai, Pasar Jombang, Pasar Bintaro Sektor 2, Pasar Serpong, dan Pasar Gedung Hijau. Seluruhnya berfungsi kecuali Pasar Gedung Hijau. Secara total, luas lahan yang ditempati oleh pasar-pasar tersebut adalah 25.721 m<sup>2</sup> dengan 1.966 kios, 865 los dan 1.795 pedagang kaki lima. Menurut data Dinas Koperasi dan UKM, jumlah koperasi seluruhnya berjumlah 433 unit yang terdiri dari koperasi karyawan (Kopkar), koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi serba usaha (KSU), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan jenis koperasi lainnya.

Kemudian ada masukan kebijakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang harus diprioritaskan, diantaranya:

1. Pemberian Bantuan bagi Pembangunan sarana keagamaan (Masjid, Majelis Ta'lim, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah);
2. Penyediaan Sarana Panti Rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Untuk persoalan kemiskinan kehidupan yang kurang mampu masih menjadi prioritas pemerintah yang ditandai dengan rendahnya kualitas hidup rata-rata penduduk melalui kurangnya pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang minim.
5. Angka Pengangguran yang tinggi berpotensi menimbulkan Kriminalitas;
6. Usulan tentang kegiatan Karang Taruna yang harus digalakan kembali, untuk mengurangi masalah yang dapat timbul akibat kurangnya bagi generasi muda.

#### **A.1. Ketenagakerjaan.**

Berdasarkan tingkat pendidikan dari data pencari kerja yang tercatat pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi periode Januari sampai dengan Mei Tahun 2012, pencari kerja dengan tingkat pendidikan SMK merupakan kelompok pencari kerja terbesar dengan jumlah **292 orang** dari total **819 orang** atau sebesar 36%, dan yang paling banyak terdapat di **kecamatan Serpong Utara** dengan jumlah pencari kerja sebanyak **102 orang** dan yang paling sedikit ada di **kecamatan Ciputat Timur** sebanyak **8 orang**. Kemudian pencari kerja dengan tingkat pendidikan SMA merupakan kelompok pencari kerja terbesar kedua dengan jumlah **255 orang** dari total **819 orang** atau sebesar 31%, dan yang paling banyak terdapat di **kecamatan Serpong Utara** dengan jumlah pencari kerja sebanyak **97 orang** dan yang paling sedikit ada di **kecamatan Setu** sebanyak **12 orang**. Pencari kerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (DI-DII, DIII dan Sarjana) juga tercatat cukup besar yaitu berjumlah **227 orang** atau 28%, tercatat yang paling besar untuk pencari kerja tingkat pendidikan perguruan tinggi (DI-DII, DIII dan Sarjana) adalah di **kecamatan Pamulang** sebanyak **58 orang** dan yang paling rendah **kecamatan Setu** sebanyak **12 orang** pencari kerja. Pencari kerja tak tamat SD hanya sebanyak 3 orang atau 0,37% dan hanya ada di kecamatan **Serpong Utara dan Pamulang**.

Karena itu, pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang akan diselenggarakan harus disesuaikan dengan yang tingkat pendidikan yang cukup tinggi tersebut. Dari sisi jenis kelamin, pencari kerja yang mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja lebih banyak **laki-laki (457 orang atau 56%)** dibandingkan **perempuan (359 orang atau 44%)**. Berdasarkan data tersebut, pelatihan tenaga kerja, selain disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan tingkat pendidikan pencari kerja, juga harus mempertimbangkan jenis kelamin pencari kerja tersebut.

Tabel 2.27																		
DATA PENCAIRI KERJA																		
DINAS SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI																		
KOTA TANGERANG SELATAN																		
TAHUN 2012																		
Periode Januari s/d Mei 2012																		
NO.	KECAMATAN	JENJANG PENDIDIKAN																JUMLAH
		SD		SMP		SMA		SMK		DI - DII		DIII		SI		SII		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SERPONG	0	0	3	6	28	20	39	24	0	2	1	2	8	10	0	0	143
2	SERPONG UTARA	0	2	3	12	60	37	59	43	0	3	7	7	6	9	0	0	248
3	PONDOKAREN	0	0	1	6	21	6	17	11	0	0	7	1	15	16	0	1	102
4	CIPUTAT	0	0	1	0	16	6	13	11	0	0	2	7	11	10	0	1	78
5	CIPUTAT TIMUR	0	0	1	0	17	8	7	1	0	2	2	2	7	14	2	2	65
6	PAMULANG	0	1	3	1	17	7	19	10	0	0	2	14	16	26	0	0	116
7	SETU	0	0	2	0	8	4	31	10	0	2	0	2	4	3	1	0	67
<b>JUMLAH</b>		0	3	14	25	167	88	185	107	0	9	21	35	67	88	3	4	819

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2012

### A.2. Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

Jumlah peserta KB baru tahun 2011 adalah 46.349 orang dari 37.961 orang total perkiraan permintaan masyarakat (PPM) atau melebihi target sebesar 26,18%. Petugas Keluarga Berencana berjumlah petugas KB sebanyak 845 orang yang terdiri dari 277 orang dokter dan 568 orang bidan.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial masih banyak dan beragam jenis permasalahannya. Penyandang masalah sosial yang paling banyak pada tahun 2011 yang didapatkan dari Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan hingga bulan juni 2012 adalah keluarga rentan sosial ekonomi, wanita rentan sosial ekonomi, rumah tidak layak huni, penyandang cacat pengidap HIV/ AIDS dan yang lainnya seperti pada tabel 3.16. Ada yang memang permasalahan khas daerah perkotaan seperti anak jalanan dan pengemis namun ada juga yang umum seperti korban bencana dan penyandang cacat.

Berdasarkan data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, jumlah rumah tangga miskin di Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 20.057 RT atau 88.544 jiwa. Rumah tangga miskin paling banyak terdapat di Pamulang yaitu sebanyak 5.710 rumah tangga atau 24.868 jiwa, sedangkan paling sedikit di Serpong Utara yaitu sebanyak 1.291 rumah tangga atau 5.256 jiwa. Hasil PPLS 2011 tersebut menunjukkan kenaikan jumlah rumah tangga miskin dari PPLS 2008 dikarenakan perbedaan metodologi pendataannya.

Berdasarkan hasil Susenas 2011, presentase penduduk miskin Kota Tangerang Selatan tahun 2011 adalah sebesar 1,5 %, Nilai ini turun dibandingkan tahun 2010 (1,67%). Adanya perbedaan angka antara data hasil PPLS 2011 dan hasil Susenas adalah karena perbedaan metode yang digunakan. Berdasarkan hasil Susenas tersebut, bila dibandingkan dengan Kabupaten ataupun Kota lainnya yang ada di Provinsi Banten maka tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan adalah yang paling kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan penduduk di Kota Tangerang Selatan relatif lebih baik dibanding Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten.

**Tabel 2.28**  
**Jumlah Rumah Tangga dan Individu Hasil Pendataan**  
**Program Perlindungan Sosial 2011 Menurut Status Kesejahteraan di Kota**  
**Tangerang Selatan**

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			Total
	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	
Setu	432	768	698	1.898
Serpong	458	884	888	2.230
Pamulang	1.124	2.105	2.481	5.710
Ciputat	832	1.261	1.108	3.201
Ciputat Timur	502	938	891	2.331
Pondok Aren	878	1.331	1.187	3.396
Serpong Utara	337	460	494	1.291
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>4.563</b>	<b>7.747</b>	<b>7.747</b>	<b>20.057</b>

Keterangan:

- Kelompok 1: Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah
- Kelompok 2: Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan antara 11 - 20% terendah
- Kelompok 3: Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan antara 21 - 30% terendah

*Sumber : Data hasil PPLS 2011*

**B. Sumber Daya Manusia**

**1. Pendidikan**

Pada saat ini di Kota Tangerang Selatan terdapat sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar negeri maupun swasta, SMP negeri dan swasta, sekolah menengah umum maupun kejuruan serta perguruan tinggi/akademi. Dalam hal fasilitas pendidikan, Pamulang adalah yang paling banyak fasilitasnya yaitu sebanyak 100 buah mulai dari TK hingga perguruan tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain sedangkan Kecamatan Setu adalah Kecamatan dengan fasilitas pendidikan paling sedikit yaitu hanya 68 buah mulai dari TK hingga perguruan tinggi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Selatan menduduki peringkat ke -2 dibawah Kota Tangerang dan diatas Kabupaten Tangerang menurut statistik Kementerian Pendidikan Nasional di wilayah Kabupaten / Kota yang ada di Tangerang dan Bidang Statistik Pelaporan pada Bappeda Kota Tangerang Selatan. Untuk Sekolah Dasar (SD) Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar **100,59** sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar **102,70** dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar **79,90**.

Kemudian Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Selatan juga menduduki peringkat ke -2 dibawah Kota Tangerang dan diatas Kabupaten Tangerang menurut statistik Kementerian Pendidikan Nasional di wilayah Kabupaten / Kota yang ada di Tangerang dan Bidang Statistik Pelaporan pada Bappeda Kota Tangerang Selatan. Untuk Sekolah Dasar (SD) Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar **91,04** sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar **73,21** dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar **60,21**.

**Tabel 2.29 Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**

Kecamatan	SD		SMP		SMA	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>100,59</b>	<b>91,04</b>	<b>102,70</b>	<b>73,21</b>	<b>79,90</b>	<b>60,21</b>

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2012

Dapat ditarik kesimpulan sementara, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin menurun nilai APK dan APM-nya, dari penurunan IPM tersebut terdapat orang yang putus sekolah karena alasan ekonomi dan akses pendidikan. Penurunan nilai APM dan APK antar jenjang pendidikan yang terbesar terdapat di **Setu**, yang dapat diartikan bahwa perlu ada intervensi pemerintah di kecamatan tersebut, baik berupa intervensi ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik.

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang penting dalam hal peningkatan kualitas manusia. Indikator pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain indikator kesehatan dan indikator ekonomi. AMH Kota Tangerang Selatan tahun 2011 berdasarkan perhitungan sementara BPS adalah sebesar 98,19% (meningkat 0,04% dari angka perbaikan tahun 2010 yang sebesar 98,15%) sedangkan RLS tahun 2011 sebesar 10,80 tahun (meningkat dari angka perbaikan tahun 2010 yaitu sebesar 10,15 tahun).

**Tabel 2.30**

**Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Tangerang Selatan  
Tahun 2011**

No.	Keterangan	Persentase		
		L	P	Total
1	Tidak/ Belum Sekolah	6,12%	5,89%	12,01%
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	4,65%	4,73%	9,38%
3	Tamat SD/ Sederajat	6,79%	8,14%	14,93%
4	SLTP/ Sederajat	7,03%	7,04%	14,07%
5	SLTA/ Sederajat	18,62%	15,92%	34,54%
6	Diploma I/ II	0,41%	0,47%	0,88%
7	Akademi/ DIII/ Sarjana Muda	1,82%	1,98%	3,80%
8	Diploma IV/ Strata I	5,45%	4,18%	9,63%
9	Strata II	0,47%	0,23%	0,70%
10	Strata III	0,05%	0,01%	0,06%
<b>TOTAL</b>		<b>51,40%</b>	<b>48,60%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, 2012

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2011 menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah paling besar yaitu 34,54%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi juga cukup tinggi, yaitu 15%.

**Tabel 2.31**

**Jumlah Sekolah Negeri di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	SDN	%	SMPN	%	SMAN	%	SMKN	%
1	Setu	13	6,25%	2	10,00%	1	8,33%	1	20,00%
2	Serpong Utara	17	8,17%	2	10,00%	1	8,33%	0	0,00%
3	Serpong	25	12,02%	4	20,00%	1	8,33%	1	20,00%
4	Pondok Aren	47	22,60%	3	15,00%	1	8,33%	1	20,00%
5	Pamulang	40	19,23%	4	20,00%	2	16,67%	1	20,00%
6	Ciputat Timur	26	12,50%	2	10,00%	2	16,67%	0	0,00%
7	Ciputat	40	19,23%	3	15,00%	4	33,33%	1	20,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>208</b>	<b>100,00%</b>	<b>20</b>	<b>100,00%</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

Dilihat dari sisi pendidikan tinggi, di Kota Tangerang Selatan terdapat 19 unit perguruan tinggi / akademi di antaranya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Institut Teknologi Indonesia (ITI), Bina Nusantara dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pamulang (Unpam), Universitas Terbuka (UT).



Kualitas pelayanan pendidikan juga masih harus ditingkatkan. Dari sisi kompetensi pendidik, masih banyak guru yang belum tersertifikasi sedangkan dari sisi sarana belajar, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan dan laboratorium. Serta ada beberapa masukan kebijakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan di Bidang Pendidikan, yaitu:

- 1) Menindaklanjuti anggaran pendidikan dari APBN yang telah memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20%;
- 2) Pengawasan terhadap Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Wilayah Kota Tangerang Selatan;
- 3) Perbaiki sarana-prasarana pendidikan dan gedung sekolah;
- 4) Mengupayakan biaya pendidikan gratis dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat SLTA;
- 5) Bantuan pendidikan untuk pondok pesantren / madrasah tidak dibedakan dengan bantuan untuk sekolah-sekolah formal;
- 6) Menuntaskan bagi Guru Bantu Sekolah (GBS) yang sampai saat ini belum diangkat menjadi PNS;
- 7) Memperhatikan Tenaga Non PNS / Honorer khususnya Tenaga Pendidikan.;
- 8) Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Pembinaan) Terhadap Komite Sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 9) Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi;
- 10) Mengutamakan pendidikan bagi anak-anak untuk dapat bersekolah dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kecerdasan bangsa khususnya Kota Tangerang Selatan maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui dinas yang terkait memberikan keringanan kepada warga Kota Tangerang Selatan dengan sekolah gratis tingkat SD dan SLTA;
- 11) Perlu banyaknya memberikan motivasi kepada anak-anak sekolah, dengan cara memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi;
- 12) Pihak sekolah agar selalu memantau anak didiknya dengan perhatian yang penuh supaya dapat menghindari perkelahian antar siswa salah satu solusinya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif;
- 13) Biaya Pendidikan terlalu mahal dan kurang terjangkau oleh Masyarakat;
- 14) Sarana perpustakaan untuk mencerdaskan anak bangsa.

Oleh karena itu bidang pendidikan masih diprioritaskan di berbagai aspek untuk menunjang peningkatan capaian target-target perbaikan bidang pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

**2. Kesehatan**

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Posyandu. Rumah sakit yang ada bertaraf internasional seperti Rumah Sakit Internasional Bintaro, Omni Hospital dan Eka Hospital. Keberadaan rumah sakit swasta memang mengikuti “urban core” yang ada dan berkembang tentunya hal ini juga untuk melayani warga perumahan yang termasuk golongan menengah keatas. Namun hingga saat ini belum ada rumah sakit umum yang dapat melayani masyarakat golongan menengah ke bawah.

Kecamatan Serpong Utara adalah kecamatan dengan akses yang paling terjauh untuk menjangkau Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan Puskesmas sedangkan Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Pondok Aren mempunyai aksesibilitas yang paling mudah/dekat dengan semua jenis fasilitas kesehatan yang tersedia.

Jumlah sarana prasarana kesehatan yang memiliki tempat perawatan (DTP) hanya ada di kecamatan Pamulang, sedangkan yang lainnya belum memiliki juga jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki oleh kecamatan-kecamatan yang ada di daerah Kota Tangerang Selatan belum teralokasi merata. Posyandu juga tidak merata pada tiap kecamatan. Walaupun sudah ada di tiap kecamatan, namun jumlahnya dan tingkatannya berbeda-beda. Karena itu pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar untuk sarana prasarana kesehatan dan pengalokasian tenaga kesehatan yang ada di tiap kecamatan, agar penanganan kesehatan dapat berjalan lebih baik lagi, terutama pada sarana prasarana yang terdapat di kecamatan Setu.

**Tabel 2.32**  
**Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)**  
**Kota Tangerang Selatan**

No	Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes	Polindes	Jumlah
1	Serpong	3	1	2	1	7
2	Serpong Utara	2	2	-	-	4
3	Pamulang	3	2	-	1	6
4	Ciputat	4	-	1	-	5
5	Ciputat Timur	4	-	3	-	7
6	Pondok Aren	6	-	-	-	6
7	Setu	3	2	-	1	6
<b>Kota Tangerang Selatan</b>		<b>25</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>41</b>

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan tahun 2012

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat tercermin dari tingkat kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu indikator pembangunan manusia. Salah satu indikator kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang menunjukkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Indikator ini dalam perhitungannya didapatkan dari Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Kedua angka ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan balita dan kesehatan reproduksi ibu. Pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kesehatan terkait hal tersebut merupakan hal yang penting.

Berdasarkan perhitungan sementara BPS Kota Tangerang Selatan, AHH Kota Tangerang Selatan tahun 2011 adalah sebesar 68,65 yang mengindikasikan bahwa penduduk Kota Tangerang Selatan yang lahir pada tahun 2011 rata-rata bisa mencapai usia 68,65 tahun.

Selain indikator makro tersebut, kondisi kesehatan masyarakat juga di antaranya dapat dilihat dari keadaan gizi balita, kondisi kesehatan ibu, kesehatan keluarga miskin, dan kesehatan orang lanjut usia. Dilihat dari keadaan gizi balita, masih ada balita dengan status gizi buruk yang tentunya harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Dari 119.668 orang balita yang ditimbang, sebesar 113.611 balita atau 94,94% dalam keadaan gizi baik, 206 balita atau 0,17% gizi buruk, 3.771 balita atau 3,15% gizi kurang dan 2.080 balita atau 1,74% gizi lebih. Meskipun sebagian balita memiliki keadaan gizi baik, masih ada 5,06% yang harus mendapat perhatian dan intervensi khusus dalam hal gizi.

**Tabel 2.33**

**Keadaan Gizi Balita yang ditimbang menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Σ balita ditimbang	Keadaan Gizi (orang)				% Keadaan Gizi			
			baik	buruk	kurang	lebih	baik	buruk	kurang	lebih
1	Serpong	10.581	10.356	27	157	41	9,90%	0,03%	0,15%	0,04%
2	Serpong Utara	8.116	7.713	24	247	142	7,37%	0,02%	0,24%	0,14%
3	Setu	5.712	5.347	26	246	93	5,11%	0,02%	0,24%	0,09%
4	Pamulang	26.421	23.755	40	1.928	698	22,70%	0,04%	1,84%	0,67%
5	Ciputat	15.521	14.903	36	417	165	14,24%	0,03%	0,40%	0,16%
6	Ciputat Timur	11.914	11.079	59	523	253	10,59%	0,06%	0,50%	0,24%
7	Pondok Aren	26.380	25.078	50	885	367	23,96%	0,05%	0,85%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>104.645</b>	<b>98.231</b>	<b>262</b>	<b>4.403</b>	<b>1.759</b>	<b>93,87%</b>	<b>0,25%</b>	<b>4,21%</b>	<b>1,68%</b>

Sumber: Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

**Tabel 2.34**

**Data Terkait Kesehatan Ibu menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	Ibu Bersalin		Neonatus	Wanita Usia Subur	Pasangan Usia Subur
			Jumlah	Ditolong Tenkes			
1	Serpong	3.245	3.098	3.098	2.636	37.417	24.464
2	Serpong Utara	2.982	2.848	2.848	2.332	34.392	22.487
3	Setu	1.535	1.468	1.468	1.239	17.697	11.571
4	Pamulang	6.814	6.505	6.505	5.669	78.568	51.372
5	Ciputat	4.627	4.416	4.416	3.284	53.348	34.882
6	Ciputat Timur	4.330	4.133	4.133	3.742	49.925	32.643
7	Pondok Aren	7.255	6.925	6.925	5.932	83.646	54.690
<b>Jumlah</b>		<b>30.788</b>	<b>29.393</b>	<b>29.393</b>	<b>24.834</b>	<b>354.993</b>	<b>232.109</b>

Sumber: Profil Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang didasarkan dari data seluruh Puskesmas, pada tahun 2011 jumlah kunjungan ibu hamil adalah sebesar 30.888 orang, dan ibu bersalin sebesar 29.393 orang. Terdapat cukup banyak rumah sakit bersalin dan praktek bidan swasta serta sudah ada pelayanan Pelatihan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Ciputat, namun belum ada pusat pelayanan kesehatan ibu ataupun unit pelayanan kesehatan ibu di Puskesmas yang lengkap dengan cakupan yang besar yang dibutuhkan terutama untuk melayani ibu hamil dari kalangan masyarakat miskin. Hal ini menjadi penting karena kesehatan ibu merupakan salah satu unsur penentu angka harapan hidup.

Sarana kesehatan merupakan sarana sosial yang sangat penting dalam pembangunan manusia yang sehat. Oleh karena itu pembangunan dalam bidang kesehatan antara lain dilakukan pada pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di antaranya dilakukan dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi keluarga miskin dan pelayanan kesehatan bagi balita melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Selain itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan selalu berupaya meningkatkan pelayanan pada Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes.

Masih cukup banyak keluarga miskin yang membutuhkan bantuan dari segi kesehatan. Menurut catatan Dinas kesehatan, masih ada 15,27% dari jumlah penduduk yang seharusnya tercakup dalam program jaminan kesehatan. Dari 9.593 orang, yang masuk dalam kuota Jamkesmas adalah sebanyak 1.119 orang. Sisanya, yaitu sebanyak 8.474 orang, masuk dalam program Jamkesda. Sedangkan jumlah lansia sasaran di wilayah pusesmas dan panti menurut Kecamatan berjumlah 278.468 orang. Pelayanan kesehatan bagi kaum marjinal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih.

**Tabel 2.35 Jumlah Lansia Sasaran di Wilayah Puskesmas dan Panti menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**

No	Puskesmas	45 - 59 Thn	≥ 60 Thn	Jumlah
1	Serpong	6.685	11.928	18.613
2	Serpong Utara	11.833	16.504	28.337
3	Setu	58.195	4.423	62.618
4	Pamulang	1.724	36.419	38.143
5	Ciputat	1.360	24.864	26.224
6	Ciputat Timur	23.665	11.774	35.439
7	Pondok Aren	36.105	6.219	42.324
<b>Jumlah</b>		<b>139.567</b>	<b>112.131</b>	<b>251.698</b>

Sumber : Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2012

**Tabel 2.36**

**Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Posyandu					Posbindu
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah	
1	Serpong	3	26	19	8	56	26
2	Serpong Utara	0	33	28	6	67	9
3	Setu	1	16	13	6	36	14
4	Pamulang	15	59	34	17	125	41
5	Ciputat	7	67	47	11	132	21
6	Ciputat Timur	4	43	51	10	108	26
7	Pondok Aren	13	81	80	8	182	39
<b>Kota Tangerang Selatan</b>		<b>43</b>	<b>325</b>	<b>272</b>	<b>66</b>	<b>706</b>	<b>176</b>

Sumber: Profil Kota Tangerang Selatan, 2012

Keberadaan fasilitas kesehatan sangatlah diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan di antaranya Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Posyandu. Jumlah total Posyandu berjumlah 706 unit yang terdiri dari Posyandu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri dengan 4.127 orang kader aktif.

**Tabel 2.37 Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**

No	Puskesmas	Posyandu		Dasawisma	Posbindu	
		Total	Aktif		Total	Aktif
1	Serpong	398	398	1.158	24	24
2	Serpong Utara	405	403	351	21	21
3	Setu	253	253	167	21	21
4	Pamulang	1.097	1.092	902	25	25
5	Ciputat	818	817	300	61	61
6	Ciputat Timur	798	798	708	55	55
7	Pondok Aren	1.231	1.228	902	66	66
<b>Kota Tangerang Selatan</b>		<b>5.000</b>	<b>4.989</b>	<b>4.488</b>	<b>273</b>	<b>273</b>

Sumber : Profil Kota Tangerang Selatan, 2012

Satu di antaranya merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Kecamatan Pamulang. Pada tahap pertama pembangunan, RSUD sudah mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan kapasitas 66 tempat tidur untuk rawat inap kelas III. Di tahun 2012 ini ditargetkan akan memiliki 250 tempat tidur rawat inap dengan 22 orang dokter spesialis dan 2 dokter gigi, serta sarana dan prasarana yang ada akan mampu memberikan pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda yang baik kepada masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan 23 unit rumah sakit lainnya dimiliki oleh pihak swasta. Keberadaan rumah sakit swasta mengikuti “urban core” yang ada dan berkembang pada umumnya untuk melayani warga perumahan yang termasuk golongan menengah ke atas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Rumah sakit di Kota Tangerang Selatan ada yang bertaraf internasional seperti Rumah Sakit Internasional Bintaro, Omni Hospital di Serpong Utara dan Eka Hospital.

Tabel 2.38 Jumlah Prasarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011

No.	Jenis	Kecamatan							Kota Tangerang Selatan
		Serpong	Serpong Utara	Pamulang	Ciputat	Ciputat Timur	Pondok Aren	Setu	
1	Puskesmas	3	2	3	4	4	6	3	25
2	Puskesmas dengan Tempat Perawatan	1	1	1	1	1	2	-	7
3	Puskesmas Pembantu	5	1	2	2	2	-	2	14
4	Keliling	1	1	1	1	1	1	1	7
5	Balai Pengobatan Swasta	46	42	41	29	43	86	11	298
6	Rumah Bersalin Swasta	4	1	4	5	4	3	-	21

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

Tabel 2.39 Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011

No	Unit Kerja	Jumlah Tenaga Medis				Tenaga Kesehatan		
		Dokter	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Jumlah	Perawat	Bidan	Jumlah
1	Setu	29	2	8	39	3	9	12
2	Serpong	293	217	126	636	136	32	168
3	Pamulang	147	55	76	278	147	70	217
4	Ciputat	156	105	92	353	66	29	95
5	Ciputat Timur	50	46	37	133	23	11	34
6	Pondok Aren	169	116	86	371	75	8	83
7	Serpong Utara	112	34	43	189	7	13	20
Jumlah		956	575	468	1999	457	172	629

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan 2012

Penyakit menular masih menjadi permasalahan yang harus mendapatkan perhatian serius. Penyakit menular yang tercatat oleh Dinas Kesehatan di antaranya demam berdarah, filariasis, tuberculosis, HIV/ AIDS, Pneumonia, infeksi menular seksual (IMS), diare, kusta, difteri dan campak. Penyakit dengan angka kejadian tertinggi di tahun 2011 adalah dyspepsia dengan 819 kejadian kemudian disusul Obs. Febris dengan 487 kejadian. Pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit tersebut ataupun penyakit-penyakit menular yang terjadi tanpa prediksi seperti flu yang disebabkan oleh virus H1N1 masih harus diprioritaskan.

**Tabel 2.40 Angka Kejadian Penyakit di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011**

No.	Nama Penyakit	Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah
1	DHF	52	120	172
2	Dyspepsia	765	54	819
3	Thypoid Fever	104	104	208
4	GE	0	99	99
5	Diare	0	38	38
6	Hepatitis	0	15	15
7	Gastritis	0	13	13
8	Gastroenteritis	212	0	212
9	Obs. Febris	449	38	487
10	Diabetes Melitus	288	36	324
11	Hipertensi	196	28	224
12	ISPA	311	0	311
13	Vulnus Lacetarum	248	0	248
14	Asma	131	0	131

Sumber: RSUD Kota Tangerang Selatan

Kemudian ada masukan kebijakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan di Bidang Kesehatan yang harus diprioritaskan, diantaranya:

- 1) Peningkatan pelayanan medis pada Puskesmas khususnya pasien rawat inap;
- 2) Agar dilakukan Pembangunan Posyandu di setiap kecamatan di Wilayah Kota Tangerang Selatan;
- 3) Dilakukan pengobatan gratis di setiap Puskesmas dan rumah sakit di wilayah Kota Tangerang Selatan bagi masyarakat tidak mampu;
- 4) Penambahan tenaga medis dan perawat serta bidan di setiap Puskesmas;
- 5) Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi rakyat miskin;
- 6) Peningkatan Pelayanan Air bersih;
- 7) Penanganan terhadap masalah kesehatan lingkungan dan sosialisasi tentang penyebaran penyakit tahunan Demam Berdarah dan menular HIV/Aids;
- 8) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengawasi tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit di wilayah Kota Tangerang Selatan;
- 9) Pemerintah agar memberikan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan kepada warganya, yaitu dengan mendirikan puskesmas dan poliklinik yang melayani masyarakat setiap saat.
- 10) Perlu adanya tenaga ahli dalam bidang kedokteran untuk membantu masyarakat yang menanggapi terkena penyakit serius;
- 11) Adanya program jamkesda untuk warga yang kurang mampu;
- 12) Biaya rumah sakit yang terlalu sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat ;
- 13) Usulan mengenai perlunya Sosialisasi Khusus tentang Program Jaminan Kesehatan bagi warga tidak mampu.

### **C. Perekonomian Daerah.**

Pasar tradisional pemerintah seluruhnya berada di Serpong, Serpong Utara, Ciputat dan Ciputat Timur. Fasilitas perdagangan jasa lain pun tidak merata yang sebagian besarnya tersebar di Serpong, Ciputat Timur dan Pamulang. Kecamatan dengan fasilitas perdagangan dan jasa yang paling sedikit adalah Setu.

Kegiatan perdagangan dan jasa tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Namun, yang paling menonjol adalah kegiatan perdagangan dan jasa disepanjang koridor jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Ceger, Jalan Raya Bintaro Utama – Jalan kesehatan, Jalan Raya Pondok Betung - Jalan Raya WR Supratman, Jalan Raya Pamulang – Ciputat, Jalan Raya Pamulang – Pondok Cabe dan Jalan Raya Ir. H. Juanda (Ciputat Raya).



**TABEL 2.41**  
**PASAR DAERAH / TRADISIONAL**  
**DI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012**

NO.	NAMA PASAR	LUAS AREAL (M2)	LOKASI (KECAMATAN)	PEDANGAN G (ORANG)
1	Pasar Ciputat	5.670	Ciputat	816
2	Pasar Jombang	6.095	Ciputat	386
3	Pasar Serpong	8.730	Serpong	837
4	Pasar Bintaro Sektor 2	2.600	Ciputat Timur	135
5	Pasar Ciputat Permai	1.000	Ciputat	55
6	Pasar Gedung Hijau	3.395	Serpong Utara	3
7	Pasar Modern BSD	30.000	Serpong	730
8	Pasar Segar Graha Raya Bintaro	10.250	Serpong Utara	644
9	Pasar Delapan	34.945	Serpong Utara	208
10	Pasar Modern Bintaro Jaya	17.000	Pondok Aren	492
11	Pasar Jengkol	1.500	Setu	40
12	Pasar Kita	17.000	Pamulang	(Baru)

Sumber: Disperindag Kota Tangerang Selatan, Tahun 2012

**Tabel 2.42**  
**Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa**  
**di Kota Tangerang Selatan**

NO.	KECAMATAN	SEBARAN							
		PASAR MODERN	PASAR TRADISIONAL	MINI MARKET	SUPER MARKET	HYPER MARKET	RESTORAN	HOTEL	BANK
1	Serpong	1	1	60	3	0	106	2	32
2	Serpong Utara	2	1	59	6	1	105	2	18
3	Ciputat	0	2	44	2	0	7	1	7
4	Ciputat Timur	0	1	46	1	0	19	1	12
5	Pamulang	0	0	44	4	0	22	0	10
6	Pondok Aren	1	1	96	3	0	90	1	14
7	Setu	0	0	38	0	0	2	0	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>387</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>351</b>	<b>7</b>	<b>96</b>

Sumber : Profil Kota Tangerang Selatan, 2012

Kemudian ada beberapa masukan kebijakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan di Bidang Perekonomian Daerah, yaitu:

1. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pemberian bantuan modal bergulir terhadap pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
2. Membatasi perijinan bagi kegiatan usaha Waralaba di setiap kecamatan;
3. Penataan, penertiban dan pembinaan para pedagang kaki lima;
4. Pembentukan Perusahaan Daerah;
5. Pembinaan terhadap potensi "Wisata Kuliner" di Kota Tangerang Selatan;
6. Pemerintah agar dapat meninjau dan mengkaji ulang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, apabila ada Investor yang ingin menginvestasikan modalnya melalui perijinan yang sesuai dengan peraturan daerah tersebut, hingga tidak ada warga yang merasa dirugikan;

7. Pembenahan tempat-tempat wisata pemancingan yang ada di Kota Tangerang Selatan agar dipelihara dengan baik;
8. Menggali potensi pembentukan Wisata Hutan Kota;
9. Menciptakan ikon daerah (ciri khas daerah) yang dapat di promosikan ke Domestik/Internasional sehingga menjadi daya tarik pariwisata dan investasi;
10. Melalui Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan, Pemerintah agar dapat mengelola obyek wisata yang ada, yaitu situ-situ yang ada di Kota Tangerang Selatan agar di kelola dengan baik, sehingga banyak wisatawan domestik yang dapat mengenal kota tangerang selatan dan menjadi masukan pendapatan daerah dengan baik;
11. Yang perlu diperhatikan juga bagi perusahaan-perusahaan yang akan mendirikan bangunan untuk usaha, harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

#### **D. Infrastruktur Dasar dan Kawasan Perkotaan.**

Di Tangerang Selatan terdapat jalan negara dengan total panjang 9,16 km dengan kondisi mantap sepanjang 8,01 km dan yang tidak mantap sepanjang 0,50 km, jalan provinsi dengan total panjang 48,76 km dengan kondisi mantap sepanjang 44,30 km dan yang tidak mantap sepanjang 4,46 km, jalan kota dengan total panjang 539,707 km dengan kondisi mantap sepanjang 501,535 km dan yang tidak mantap sepanjang 38,172 km, serta jalan lingkungan dengan total panjang 407,76 km dengan kondisi baik sepanjang 307,46 km. Berdasarkan survey lapangan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dari keseluruhan panjang jalan, sebesar 91% dalam kondisi baik dan 9% dalam kondisi yang kurang baik (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan, 2012). Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2014, baik yang dibiayai oleh APBD Kota Tangerang Selatan, diperkirakan dapat mengurangi kerusakan sehingga jalan yang rusak ringan bisa menjadi baik seluruhnya dan ruas jalan yang rusak berat dapat berkurang. Namun, upaya penanggulangan kerusakan tersebut belum memadai karena tingkat kerusakan yang tinggi pada jalan kota sehingga masih menempatkan peningkatan kualitas jalan sebagai permasalahan utama.

Pengelolaan sampah, terutama di perkotaan, merupakan hal yang sangat penting. Kota Tangerang Selatan belum memiliki tempat pemrosesan akhir sampah sesuai yang diamanatkan Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya menyediakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu sejak di tingkat rumah tangga, komunitas hingga lokal. Pada tahun 2014 masih dialokasikan dana untuk perluasan lahan Tempat pembuangan akhir sampah (TPS Cipeucang) dan beberapa utilitas lainnya. Namun, hal tersebut belum mencukupi untuk menangani timbulan sampah yang sebesar 4.516,13 m<sup>3</sup> sampah/hari. Pembiayaan yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah sangat besar dan kapasitas keuangan daerah belum dapat mencakup keseluruhan pengelolaan sampah. Karena itu, perlu upaya untuk mendorong peran serta masyarakat untuk mengelola sampah terutama di permukiman tertata dan pasar-pasar. Selain itu juga perlu dilakukan upaya kerjasama dengan swasta.

Pada ruas-ruas jalan tertentu terdapat titik-titik kemacetan yang umumnya berlokasi di persimpangan jalan (pertigaan dan perempatan), sekitar pasar, sekitar lintasan kereta rel listrik dan sekitar pabrik. Dalam hal banjir, belajar dari musibah banjir yang dikarenakan hujan lebat pada awal tahun 2013, di Kota Tangerang Selatan terdapat 32 (tiga puluh dua) permukiman rawan banjir yang umumnya berlokasi di sekitar sungai, yaitu Kali Angke, Kali Serua, Kali Pasanggrahan, Kali Ciputat, Kali Kedaung dan lain-lainnya. Tempat pemakaman umum (TPU) berjumlah 21 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sebesar 1.355.926 orang, luasan tersebut belum mencukupi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemacetan, banjir dan penyediaan sarana pemakaman masih menjadi permasalahan pada tahun 2014.

**Tabel 2.43**  
**Titik Rawan Kemacetan Kota Tangerang Selatan**  
**Tahun 2011**

KECAMATAN	NO	TITIK KEMACETAN
SERPONG UTARA	1.	Simpang TL Gading Serpong
	2.	PT. Pratama
	3.	Putaran Plaza Serpong
	4.	Simpang Paku Jaya
	5.	Simpang Pondok Jagung
	6.	Jl. Bhayangkara
	7.	Bundaran Alam Sutera
	8.	U - Turn Depan Hyundai
	9.	Depan WTC Serpong
	10.	U - Turn Melati Mas Serpong
	11.	Plaza BSD
SERPONG	1.	Pasar Serpong
	2.	Simpang German Centre
	3.	PT. Sinar Mas, Cilenggang
	4.	Simpang Taman Tekno
	5.	ITC BSD / Junction
	6.	Simpang Santa Ursula
	7.	Simpang Tiga Jalan Ciater
SETU	1.	Bundaran Taman Tekno
	2.	Simpang Muncul
	3.	Simpang Viktor
	4.	Puspiptek
	5.	Kodiklat TNI Rawa Buntu
PAMULANG	1.	Simpang Pamulang 2, Pondok Benda
	2.	Bundaran Pamulang / UNPAM
	3.	Simpang Sasak Tinggi
	4.	Simpang Tiga Perumahan Villa Dago
	5.	Simpang Reni Jaya
	6.	Simpang Gaplek (Depan Mc. D)
	7.	Modern Hill, Pondok Cabe
	8.	Depan MTSN / SDN Pamulang
	9.	Pamulang Square

LANJUTAN

KECAMATAN	NO	TITIK KEMACETAN
CIPUTAT	1.	Pasar Jombang / Stasiun Sudimara
	2.	Simpang Maruga
	3.	Bawah Fly Over, Jl. Arya Putra
	4.	Bawah Fly Over, Jl. Ki Hajar Dewantara
	5.	Simpang Empat Kp. Duren
	6.	Simpang Tanah Tinggi
	7.	Simpang Kedaung
	6.	Pasar Cimanggis
	7.	Simpang Legoso
	1	Simpang Kp. Utan
	2	Simpang Gintung
	3	Bukit Cirenderu
	4	Simpang Kertamukti
	5	Depan UIN
	6	Depan UMJ
	7	Stasiun KA Pondok Ranji
	8	Simpang Kompas - WR. Supratman
	9	Jl. Pahlawan
	Pondok Aren	1
2		Bundaran Sektor 7
3		Pertigaan LIA
4		Bundaran British School
5		Simpang Zodiak
6		Simpang Mesjid Al - Qopur
7		Simpang Sekolah Pembangunan
8		Simpang Mitra 10
9		Simpang Bangke
10		Simpang Gopli
11		Simpang Plaza Bintaro
12		Simpang Puskesmas Pondok Aren
13		Simpang Puri Maharta
14		Simpang Tegal Rotan

Sumber : Profil Kota Tangerang Selatan, 2012

Selain hal-hal tersebut di atas, pelayanan air bersih, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan drainase, meskipun sudah menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2012 dan 2013, masih menjadi permasalahan dan karenanya menjadi prioritas untuk ditangani pada tahun 2014.

Kemudian ada masukan kebijakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan di Bidang Infrastruktur Dasar dan Kawasan Perkotaan yang harus diprioritaskan, diantaranya:

- 1) Pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;
- 2) Pembangunan gedung DPRD Kota Tangerang Selatan;

- 3) Upaya perbaikan infrastruktur (jalan lingkungan dan jalan otonom, drainase, jembatan dan penerangan jalan umum) di wilayah Kota Tangerang Selatan;
- 4) Peningkatan manajemen persampahan antara lain; penataan Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA) dan perlengkapan sarana penunjang;
- 5) Penataan pengelolaan pasar-pasar (pedagang dan perparkiran);
- 6) Penataan Transportasi : trayek, kendaraan umum (pewarnaan kendaraan, uji kelayakan) dan rambu-rambu jalan;
- 7) Membangun sarana informasi dan telekomunikasi umum bagi masyarakat (pembangunan Hotspot);
- 8) Memperbaiki dan menata kembali fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 9) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Lindung Perkotaan;
- 10) Penataan pembangunan Telekomunikasi Tower terpadu;
- 11) Mengupayakan penyediaan lahan dan penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- 12) Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana Seni Budaya Daerah;
- 13) Kurangnya sarana Penerangan Jalan Umum di wilayah kota Tangerang Selatan;
- 14) Penghijauan pada ruas jalan yang tidak teratur;
- 15) Masih banyak Jalan-jalan yang rusak dan berlubang;
- 16) Penertiban jalan-jalan untuk mengurangi kemacetan setiap ruas jalan yang bekerjasama antara DISHUB dan pihak kepolisian;
- 17) Penataan ulang daerah-daerah terpencil untuk dapat tersalurkan segala kebutuhan pembangunan tatanan kotanya dengan baik;
- 18) Pengelolaan limbah sampah yang baik bagi masyarakat dengan memberikan mesin penghancur sampah kepada warga;
- 19) Sarana - sarana air bersih milik PDAM Kabupaten Tangerang, untuk itu Pemerintah agar membangun PDAM di daerah Kota Tangerang Selatan untuk dapat mengurangi keluhan warga akan air bersih;
- 20) Sistem drainase yang buruk dapat mengakibatkan banjir dikala hujan lebat.

#### **E. Tata Kelola Pemerintahan.**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya prasarana dan sarana penyelenggaraan pemerintahan seperti gedung kantor dan perlengkapan serta peralatannya sehingga SKPD-SKPD belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. SKPD-SKPD bertempat sementara di Kecamatan Pamulang, yaitu gedung Kantor Kecamatan Pamulang dan gedung eks Akademi Perawat Universitas Pamulang di Kompleks Witanaharja; dan di Kecamatan Serpong, yaitu gedung kantor di Cilenggang, gedung eks BLK Kabupaten Tangerang, gedung Pasar Ikan Higienis (PIH) dan gedung eks Kantor Kebersihan Wilayah Ciputat. Beberapa kecamatan juga belum memiliki gedung kantor yang sangat mendesak mengingat kecamatan melayani masyarakat secara langsung sehingga membutuhkan prasarana dan sarana yang memadai.

Pada lokasi-lokasi tersebut, sudah tersedia sarana perkantoran seperti meja dan kursi, komputer dan perlengkapannya. Namun demikian, sarana tersebut masih belum mencukupi karena belum sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pegawai. Selain itu juga harus dipersiapkan sarana bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu, regulasi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah juga masih harus dilengkapi. Peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di antaranya yang mengatur tentang tata tertib DPRD dan, pemungutan pajak dan retribusi, belum tersedia. Dokumen-dokumen terkait perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah yang dibutuhkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga belum tersedia.

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk setiap SKPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal dalam melayani masyarakat. Pada tahun 2013, jumlah PNS adalah sebesar 5.379 orang dan sebagian besarnya adalah tenaga kependidikan atau guru dan tenaga kesehatan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih dari satu juta orang, proporsi PNS masih di bawah 0,5%. Karena itu, pada tahun 2014 masih memungkinkan untuk dilakukan penambahan pegawai melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus tenaga kependidikan atau guru dan tenaga kesehatan.

Kompetensi pegawai juga masih harus ditingkatkan. Sebagian pejabat eselon belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan masih sedikit pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa padahal banyak dibutuhkan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, masih sedikit tenaga yang ahli dalam pengelolaan barang daerah, penatausahaan keuangan serta pengawas jembatan, jalan dan bangunan.

Kemudian ada masukan kebijakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan di Bidang Tata Kelola Pemerintahan yang harus diprioritaskan, diantaranya:

1. Peningkatan kesejahteraan Pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Mengoptimalkan Pelayanan Sistem Perijinan Terpadu melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;
3. Peningkatan sistem manajemen pelayanan IMB;
4. Pengendalian dan pembenahan manajemen kependudukan;
5. Pembentukan Pusat Informasi Pembangunan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan.

**E.1. Kesenjangan Antar Wilayah**

Selain 5 (lima) isu strategis umum seperti diuraikan di atas, terdapat juga permasalahan kesenjangan antar wilayah. Pada tahun 2011, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga (adh) berlaku Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp. 13.290.141,00 Juta sedangkan PDRB adh konstan adalah sebesar Rp. 5.853.761,00 Juta. Angka-angka tersebut meningkat dari total PDRB adh berlaku pada tahun 2010 yang sebesar Rp. 11.688.210,08 Juta dan PDRB adh konstan yang sebesar Rp. 5.378.417,19 Juta.

**Tabel 2.44**  
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2011  
 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011

N O	Sektor	2010		2011	
		(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	90.445	0,77%	113,653	0,86%
2	Pertambangan & Penggalian	2.550	0,02%	2,898	0,02%
3	Industri Pengolahan	1.687.231	14,44%	1.975,202	14,86%
4	Listrik, Gas & Air bersih	382.269	3,27%	446,565	3,36%
5	Konstruksi	864.981	7,40%	1.083,120	8,15%
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	3.758.971	32,16%	4.091,275	30,78%
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.731.517	14,81%	2.002,052	15,06%
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	1.505.304	12,88%	1.603,954	12,07%
9	Jasa-jasa	1.664.942	14,24%	1.971,422	14,83%
	<b>PDRB</b>	<b>11.688.210</b>	<b>100%</b>	<b>13.290,141</b>	<b>100%</b>

Perkembangan Indeks Williamson yang dihitung untuk mengetahui tingkat kesenjangan antar wilayah, diperoleh informasi bahwa kesenjangan semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya angka indeks. Kesenjangan semakin melebar kemungkinan diakibatkan pembangunan yang sangat cepat di wilayah **Serpong** dan **Serpong Utara** dibandingkan wilayah lain, terutama **Setu**.

Berdasarkan data PDRB per kapita dan perhitungan Indeks Williamson terlihat kesenjangan yang cukup besar antar wilayah Kota Tangerang Selatan. Karena itu perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan nilai PDRB per kapita di kecamatan-kecamatan dengan PDRB per kapita yang lebih kecil dibandingkan dengan kecamatan dengan PDRB per kapita yang lebih besar.



### BAB III

#### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian Tahun 2013 – 2014 dapat digambarkan melalui rencana kerangka ekonomi daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kota Tangerang Selatan berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun sebagai prioritas pembangunan. Pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2013 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2011-2016. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Banten Tahun 2013.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 13.290.141,00 Juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp. 5.853.761,00 Juta. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2011 mencapai 1.355.926 orang, PDRB per kapita adalah sebesar Rp. 9.801.874,79. Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 6.6). Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 terutama didukung oleh percepatan pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pengangkutan dan komunikasi, dan bangunan yang tumbuh sangat signifikan. Secara keseluruhan, semua faktor ekonomi di Kota Tangerang Selatan menunjukkan pertumbuhan positif.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pencapaian target pendapatan daerah, diantaranya adalah:

- Membangun dan mengembangkan sistem data base *on-line* untuk pengelolaan BPHTB bekerja sama dengan Bank Jabar Banten dan Badan Pertanahan Nasional;
- Merancang penerapan dan mengembangkan perhitungan sistem *on-line* kewajiban pajak terhutang dengan wajib pajak;

- Pada tahun 2014 Kota Tangerang Selatan akan mulai melaksanakan pengelolaan PBB sebagai Pajak Asli Daerah (PAD);
- Pada Tahun 2013 dimulainya kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah di Kota Tangerang Selatan;
- Meningkatkan kualitas SDM dan sosialisasi pengelolaan pajak daerah kepada semua *stakeholder*;
- Melaksanakan koordinasi dengan Pusat, Provinsi dan SKPD penghasil lainnya dalam meningkatkan pendapatan daerah.

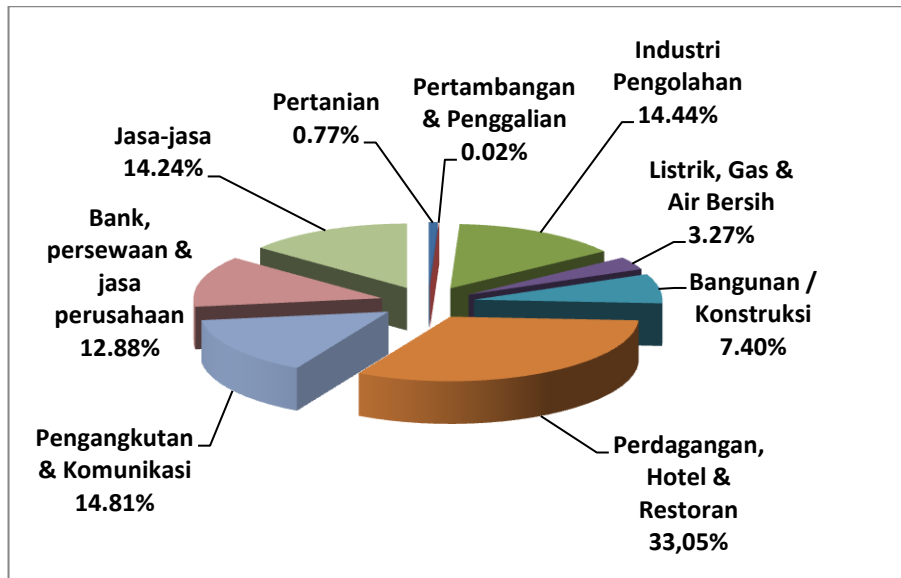
Kemudian berdasarkan data PDRB tahun 2011, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi (14,81%) dan perdagangan hotel dan restoran (33,05%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah industri pengolahan (14,44% dan jasa-jasa (14,24%), persewaan dan jasa perusahaan (12,88%). Lima sektor lain masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10%.

**Tabel 3.1**  
**Angka agregat PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita**  
**Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 - 2011**

URAIAN	2010	2011*)
a. PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	11.688.210,0 8	13.290.141,0 0
b. PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp)	5.378.417,19	5.853.761,00
c. Jumlah penduduk pertengahan tahun	1.290.322	1.355.926
d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	9.058.366,89	9.801.874,79
e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 (Rp)	4.168.275,20	5.853.761,25

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2012

Ket : \*) Angka Perbaikan



Gambar 3.1 Grafik persentase peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang Selatan adh Berlaku Tahun 2011

Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang selatan didominasi oleh sektor tersier, yaitu pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel dan restoran; jasa-jasa; dan bank, persewaan dan jasa perusahaan, yang memberikan kontribusi hampir 74,10%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi) memberikan kontribusi 25,10% dan sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi kurang dari 0,80%. Struktur ekonomi tersebut berbeda dengan struktur ekonomi Kabupaten Tangerang yang didominasi oleh sektor sekunder yang berasal dari sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sangat besar.

Struktur ekonomi ini diperkirakan tidak banyak berubah pada tahun 2012 dan 2013. Namun, berdasarkan kecenderungan sejak tahun 2009 hingga tahun 2011, diperkirakan terjadi pergeseran dari sektor primer dan sekunder ke sektor tersier.

Tantangan yang harus diperhatikan adalah dampak krisis ekonomi global yang berlangsung sejak tahun 2008. Dampak yang besar terhadap perekonomian regional diperkirakan akan semakin dirasakan pada tahun 2014. Dari sisi internal, kesenjangan perwilayahan masih cukup besar sehingga Pemerintah Daerah harus memperhatikan segi perwilayahan dalam perencanaan tahun 2014. Selain itu, kemampuan keuangan daerah juga tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan semua permasalahan sekaligus sehingga harus disusun prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2014.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Asumsi pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 diproyeksikan mencapai Rp. 711.809.320.000,00 yang sebagian besar berasal dari Hasil Pajak Daerah, yaitu sebesar Rp. 635.000.000.000,00. Dana Perimbangan pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp. 622.065.112.032,00 yang berasal dari Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Buka Pajak. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp. 398.191.891.088,00.

**Tabel. 3.2**  
**Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan**  
**Tahun 2013 dan Rencana Pendapatan Tahun 2014**

URAIAN	Pagu Anggaran	
	2013	2014
1	2	3
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>485.737.224.840,00</b>	<b>711.809.320.000,00</b>
Hasil Pajak Daerah	415.020.994.840,00	635.000.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	54.216.230.000,00	58.659.320.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.500.000.000,00	18.150.000.000,00
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>733.949.962.032,00</b>	<b>622.065.112.032,00</b>
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	196.887.658.032,00	85.887.658.032,00
Dana Alokasi Umum	536.177.454.000,00	536.177.454.000,00
Dana Alokasi Khusus	884.850.000,00	0,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>391.667.324.000,00</b>	<b>398.191.891.088,00</b>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	273.564.724.000,00	301.000.000.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	118.102.600.000,00	97.191.891.088,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.611.354.510.872,00</b>	<b>1.732.066.323.120,00</b>

#### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja tidak langsung sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai meliputi Gaji (Uang Representasi) dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. SKPD Kota Tangerang Selatan berjumlah 38 dengan rincian 7 badan, 13 dinas, 1 inspektorat, 5 kantor, 1 RSUD, 1 satuan, 3 sekretariat dan 7 kecamatan. Selain itu juga dialokasikan untuk belanja pegawai bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.

Jumlah pegawai pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai lebih dari 5.629 orang yang terdiri atas pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV serta pelaksana dan jabatan fungsional seperti guru dan dokter, serta rencana CPNSD khusus tenaga kependidikan atau guru dan tenaga kesehatan yang diperkirakan sejumlah 250 orang.

**Tabel 3.3**  
**(Pagu Indikatif) Belanja Daerah Tahun 2013**  
**dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2014**

URAIAN	Pagu Anggaran	
	2013	2014
1	2	3
<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>524.621.262.693,00</b>	<b>522.041.136.893,00</b>
Belanja Pegawai	494.541.136.893,00	494.541.136.893,00
Belanja Hibah	13.388.000.000,00	13.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	13.192.125.800,00	13.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	500.000.000,00	500.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.253.238.868.807,00</b>	<b>1.433.400.000.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1.777.860.131.500,00</b>	<b>1.955.441.136.893,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(166.505.620.628,00)</b>	<b>(223.374.813.773,00)</b>

Belanja langsung diarahkan pada penanganan 5 (lima) isu strategis yang merupakan prioritas yang akan dibahas lebih lanjut dalam kebijakan pembangunan daerah.

Total belanja direncanakan sebesar Rp. 1.955.441.136.893,00 dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar 27,00% atau Rp. 522.041.136.893,00 dan belanja langsung sebesar 73,00% atau Rp. 1.433.400.000.000,00.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2014 rencana penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp. 103.920.000.000,- dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya dan juga pada tahun 2014 direncanakan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 21.000.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan modal BUMD.

**Tabel 3.4**  
**Rencana Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan**  
**Tahun 2014**

URAIAN	Pagu Anggaran	
	2013	2014
1	2	3
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	166.505.620.628,00	103.920.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	166.505.620.628,00	103.920.000.000,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>166.505.620.628</b>	<b>103.920.000.000</b>
<b>Pengeluaran pembiayaan daerah</b>		<b>21.000.000.000</b>
Penyertaan Modal BUMD		21.000.000.000
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>166.505.620.628,00</b>	<b>82.920.000.000,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>(140.454.813.773,00)</b>

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2014 harus sesuai dengan 9 (sembilan) kriteria yang telah ditentukan, diantaranya adalah:

1. Program dan kegiatan tahun 2014 dikaitkan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah;
  - Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar;
  - Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Pendidikan;
  - Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Kesehatan;
  - Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - Peningkatan Ketahanan Pangan;
  - Penanggulangan Kemiskinan & Pengangguran;
2. Kebijakan strategis;
3. Percepatan capaian RPJMD / Renstra SKPD, SPM dan dokumen perencanaan lainnya serta mengacu kepada tupoksi dan menghasilkan target kinerja *outcome*;
4. Format 1 (F1) SKPD hasil Forum SKPD, F1 dan F2 hasil musrenbang Kecamatan , dan hasil Musrenbang Kota agar dijadikan acuan dalam menetapkan lokasi kegiatan dimaksud;
5. Kegiatan lanjutan;
6. Bagi SKPD yang menangani program penanggulangan kemiskinan agar menggunakan data rumah tangga sasaran dan individu dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 sebagai data sasaran program / kegiatan Tahun Anggaran 2014 terkait penanggulangan kemiskinan baik *cluster* 1, 2 dan 3 dengan penjelasan:
  - **Cluster 1**, Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (sasaran, kelompok rumah tangga sangat miskin, miskin, hampir miskin);
  - **Cluster 2**, Pemberdayaan masyarakat , PNPM mandiri (sasaran, kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin);
  - **Cluster 3**, Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (sasaran, pelaku usaha mikro dan kecil);
7. Bagi SKPD yang mengusulkan pembangunan fisik konstruksi, agar melengkapi dokumen perencanaan (*FS/kajian, DED, Master Plan*), serta dicantumkan jenis sasaran dan lokasi yang jelas dimana pembangunan fisik konstruksi tersebut akan dilaksanakan;

8. Setiap usulan kegiatan baik konstruksi dan non konstruksi harus melampirkan KAK / TOR, ROK dan RAB ;
9. Kegiatan perencanaan konstruksi tidak dilaksanakan bersamaan dengan pembangunannya, kecuali bangunan sederhana dan prototype;

Sedangkan target program yang dijabarkan mengacu pada pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target-target lain yang menjadi target wajib setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target-target yang telah ditetapkan dalam MDGs dan SPM menjadi dasar pengukuran kinerja terkait beberapa urusan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kependudukan dan catatan sipil.

#### **4.2 Prioritas Pembangunan**

Berdasarkan isu strategis yang menjadi permasalahan utama Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2014, ditetapkanlah beberapa prioritas dan fokus masing-masing sebagai berikut.

##### **Prioritas 1: Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran**

Sasaran dari prioritas tersebut adalah:

- a) Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan
- b) Meningkatnya penciptaan lapangan kerja
- c) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
- d) Meningkatnya akses dan informasi lapangan kerja
- e) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

##### **Prioritas 2: Peningkatan kualitas infrastruktur dasar**

Sasaran dari prioritas tersebut adalah :

- a) Meningkatnya aksesibilitas orang, barang dan jasa dengan peningkatan ketersediaan kualitas prasarana dan sarana dasar wilayah jalan melalui pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan
- b) Meningkatnya kuantitas, kualitas sarana dan utilitas
- c) Tertanganinya masalah bencana alam
- d) Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas
- e) Meningkatnya penyelenggaraan tata ruang daerah dengan keserasian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup



**Prioritas 3: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan**

Sasaran dari prioritas tersebut adalah:

- a) Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
- b) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- c) Meningkatkan dan berkembangnya budaya baca di kalangan masyarakat
- d) Meningkatkan akses pendidikan penduduk miskin terhadap layanan pendidikan
- e) Meningkatkan peran dan kewirausahaan kepemudaan, pengetahuan, kemampuan sumber daya pemuda serta pengembangan sarana – prasarana olahraga

**Prioritas 4: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan**

Sasaran dari prioritas tersebut adalah:

- a) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang berkualitas
- b) Meningkatkan Pengembangan Kesehatan Berbasis Masyarakat melalui Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
- c) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
- d) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
- e) Meningkatkan akses penduduk miskin dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas

**Prioritas 5: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah**

Sasaran dari prioritas tersebut adalah :

- a) Tersusunnya regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan
- b) Meningkatkan kapasitas aparatur
- c) Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana penyelenggaraan pemerintahan
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan publik
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik terhadap kebijakan pembangunan daerah

**Prioritas 6: Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Sasaran dari prioritas tersebut adalah:

- a) Meningkatkan akses UKM terhadap sumber daya produktif
- b) Meningkatkan kompetensi pelaku UMK dan kualitas kelembagaan UKM
- c) Meningkatkan daya saing produk-produk unggulan lokal daerah
- d) Meningkatkan investasi dunia usaha dan peluang usaha

**Prioritas 7: Peningkatan Ketahanan Pangan**

Sasaran dari prioritas tersebut adalah:

- a) Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan harga dan kemudahan pangan
- b) Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura, perikanan dan peternakan
- c) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Program dan kegiatan prioritas daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sasaran. Rencana Program ini mengacu kepada kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 serta hasil proses perencanaan seperti Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kota Tangerang Selatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 mencakup 110 program dengan Rencana Pagu Program Non Urusan SKPD sebesar Rp. 175.889.308.850 dan Rencana Pagu Program Urusan SKPD sebesar Rp. 1.257.510.691.149 sehingga total Rencana Pagu Belanja Langsung Tahun 2014 sebesar Rp. 1.433.400.000.000. Program prioritas daerah Tahun 2014 disusun per urusan, sebagai berikut:

**1. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri**

Kebijakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri secara umum diarahkan pada upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, mengembangkan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Program dan Pagu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	8.305.600.000
2.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.182.500.000
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	510.000.000

## 2. Urusan Sosial

Kebijakan pada urusan Sosial secara umum diarahkan pada pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pembinaan panti asuhan / panti jompo, penyuluhan dan penanggulangan korban bencana alam, Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dan penanggulangan akibat bencana. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Program dan Pagu Urusan Sosial**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	6.993.507.800
2	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	800.000.000
3	Program penyuluhan dan penanggulangan korban bencana alam	700.000.000
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	740.000.000
5	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.435.000.000
6	Program penanggulangan akibat bencana	3.100.000.000

## 3. Urusan Perencanaan Pembangunan

Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya mengembangkan data / informasi, kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Program dan Pagu Urusan Perencanaan Pembangunan**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program pengembangan data / informasi	2.766.135.000
2	Program kerjasama pembangunan	1.575.000.000
3	Program perencanaan pembangunan daerah	17.053.865.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	346.500.000

#### 4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Program dan Pagu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program pemberdayaan masyarakat dan desa (replikasi PNPM)	1.614.400.000
2	Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	250.000.000
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	810.000.000
4	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	250.000.000

#### 5. Urusan Perumahan

Kebijakan pada urusan perumahan secara umum pada upaya pengembangan infrastruktur permukiman, peningkatan lingkungan sehat perumahan, pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Program dan Pagu Urusan Perumahan**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program pengembangan infrastruktur permukiman	10.775.000.000
2	Program lingkungan Sehat Perumahan	175.889.308.851
3	Program pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU	14.430.950.000
4	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	4.535.000.000
5	Program penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman	3.976.100.000

#### **6. Urusan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum diarahkan pada upaya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan, dan peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**Program dan Pagu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	900.000.000
2	Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	1.522.000.000
3	Program peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	300.000.000

## 7. Urusan Lingkungan Hidup

Kebijakan pada urusan lingkungan hidup secara umum diarahkan pada upaya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Program dan Pagu Urusan Lingkungan Hidup**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2.665.000.000
2	Program pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam	7.525.000.000
3	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1.623.000.000
4	Program peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA	350.000.000
5	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	73.361.789.000

## 8. Urusan Penataan Ruang

Kebijakan pada urusan penataan ruang secara umum diarahkan pada upaya pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, kebijakan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangs. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Program dan Pagu Urusan Penataan Ruang**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.807.750.000
2	Program perencanaan tata ruang	450.000.000
3	Program kebijakan pemanfaatan ruang	2.700.000.000
4	Program pengendalian pemanfaatan ruang	423.595.425.000

**9. Urusan Pertanahan**

Kebijakan pada urusan pertanahan secara umum diarahkan pada upaya penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.9**  
**Program dan Pagu Urusan Pertanahan**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	34.750.000.000

**10. Urusan Pekerjaan Umum**

Kebijakan pada urusan pekerjaan umum secara umum diarahkan pada upaya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan, Pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, pengendalian banjir, dan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.10**  
**Program dan Pagu Urusan Pekerjaan Umum**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	128.584.207.461
2	Program pengembangan, Pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	12.145.000.000
3	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	35.536.875.388
4	Program pengendalian banjir	8.000.000.000
5	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1.050.000.000



### 11. Urusan Perhubungan

Kebijakan pada urusan perhubungan secara umum diarahkan pada upaya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan, dan pembangunan komunikasi, informasi dan media massa. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.11**  
**Program dan Pagu Urusan Perhubungan**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarna dan fasilitas LLAJ	700.000.000
2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2.497.500.000
3	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	2.100.000.000
4	Program peningkatan pelayanan angkutan	5.890.000.000

### 12. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebijakan pada urusan komunikasi dan informatika secara umum diarahkan pada upaya mengembangkan komunikasi, informasi dan media massa. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.12**  
**Program dan Pagu Urusan Komunikasi dan Informatika**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	900.000.000

### 13. Urusan Perpustakaan

Kebijakan pada urusan perpustakaan secara umum diarahkan pada upaya pengembangan budaya baca dan pengembangan pelayanan perpustakaan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.13**  
**Program dan Pagu Urusan Perpustakaan**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3.115.200.000

#### 14. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan pada urusan kepemudaan dan olahraga secara umum diarahkan pada upaya peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana, dan prasarana olahraga. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.14**  
**Program dan Pagu Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.512.000.000
2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	730.000.000
3	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	2.800.000.000
4	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	2.326.100.000
5	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	1.100.000.000

#### 15. Urusan Kebudayaan

Kebijakan pada urusan kebudayaan secara umum diarahkan pada upaya pengembangan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.15**  
**Program dan Pagu Urusan Kebudayaan**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program pengembangan nilai budaya	1.751.000.000
2	Program pengelolaan kekayaan budaya	450.000.000

### 16. Urusan Pariwisata

Kebijakan pada urusan pariwisata secara umum diarahkan pada upaya pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.16**

**Program dan Pagu Urusan Pariwisata**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	150.000.000
2	Program Program Pengembangan Destinasi	800.000.000

### 17. Urusan Pendidikan

Kebijakan pada urusan pendidikan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, peningkatan pendidikan menengah, pengembangan pendidikan formal dan non formal dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.17**

**Program dan Pagu Urusan Pendidikan**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	61.466.609.300
2	Program pendidikan menengah	12.145.800.000
3	Program pendidikan formal dan non formal	3.464.672.000
4	Program Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	2.207.800.000

### 18. Urusan Kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan secara umum diarahkan pada upaya pelayanan kesehatan penduduk miskin, pengawasan obat dan perbekalan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.18**  
**Program dan Pagu Urusan Kesehatan**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	15.451.000.000
2	Program upaya kesehatan masyarakat	22.258.386.000
3	Program obat dan perbekalan kesehatan	33.000.000.000
4	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	865.000.000
5	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	250.000.000
6	Program perbaikan gizi masyarakat	2.506.370.000
7	Program promosi dan pemberdayaan masyarakat	2.173.000.000
8	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana layanan kesehatan	41.508.813.000
9	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	2.230.400.000
10	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	4.230.100.000
11	Program pengembangan lingkungan sehat	686.825.000
12	Program penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2.409.100.000
13	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit	10.320.500.000

### **19. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Kebijakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera secara umum diarahkan pada upaya meningkatkan keluarga berencana. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.19**  
**Program dan Pagu Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program keluarga berencana	2.250.000.000

## 20. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah secara umum diarahkan pada upaya peningkatan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.20**

### **Program dan Pagu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	3.174.821.000
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	4.553.500.000
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.307.500.000

## 21. Urusan Ketenagakerjaan

Kebijakan pada urusan ketenagakerjaan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, dan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.21**

### **Program dan Pagu Urusan Ketenagakerjaan**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.443.800.000
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.080.000.000
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.945.300.000

## 22. Urusan Ketransmigrasian

Kebijakan pada urusan ketransmigrasian secara umum diarahkan pada upaya pengadaan berbagai kegiatan untuk transmigrasi regional. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.22**  
**Program dan Pagu Urusan Ketransmigrasian**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program Transmigrasi Regional	450.000.000

## 23. Urusan Perdagangan

Kebijakan pada urusan perdagangan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan dan pengembangan ekspor, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.23**  
**Program dan Pagu Urusan Perdagangan**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	510.000.000
2	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2.850.000.000
3	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	400.000.000

## 24. Urusan Pertanian

Kebijakan pada urusan pertanian secara umum diarahkan pada upaya penignaktan produksi pertanian/perkebunan, dan peningkatan produksi hasil peternakan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.24**  
**Program dan Pagu Urusan Pertanian**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.897.500.000
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.329.000.000

## **25. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Kebijakan pada urusan kelautan dan perikanan secara umum diarahkan pada upaya pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.25**  
**Program dan Pagu Urusan Kelautan dan Perikanan**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.129.900.000
2	Program Peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan	103.500.000

## **26. Urusan Ketahanan Pangan**

Kebijakan pada urusan ketahanan pangan secara umum diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan pertanian atau perkebunan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.26**  
**Program dan Pagu Urusan Ketahanan Pangan**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	3.925.000.000

## 27. Urusan Penanaman Modal

Kebijakan pada urusan penanaman modal secara umum diarahkan pada upaya peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan kebijakan pengembangan potensi unggulan daerah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.27**  
**Program dan Pagu Urusan Penanaman Modal**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	4.850.000.000
2	Program Kebijakan Pengembangan potensi Unggulan Daerah	555.000.000

## 28. Urusan Industri

Kebijakan pada urusan industri secara umum diarahkan pada upaya pengembangan industri kecil dan menengah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.28**  
**Program dan Pagu Urusan Industri**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	3.040.000.000

## 29. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan pada urusan kependudukan dan catatan sipil secara umum diarahkan pada upaya penataan administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.29**  
**Program dan Pagu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1	Program Penataan administrasi kependudukan	6.555.000.000



**30. Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.**

Kebijakan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian secara umum diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.30**

**Program dan Pagu Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	30.000.000.000
2	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.800.000.000
3	Program Kerjasama informasi dan media massa	11.890.000.000
4	Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	6.685.000.000
5	Program Peningkatan kapasitas lembaga RT dan RW	6.875.000.000
6	Program Penataan organisasi penyelenggara pemerintahan daerah	2.720.000.000
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.400.000.000
8	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	16.040.000.000
9	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	10.650.000.000
10	Program Pendidikan Kedinasan	1.350.000.000
11	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	9.408.440.200
12	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	2.000.100.000
13	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.500.000.000
14	Program pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa	1.500.000.000
15	Kebijakan Pengembangan potensi Unggulan Daerah	555.000.000

**31. Urusan Kearsipan**

Kebijakan pada urusan kearsipan secara umum diarahkan pada upaya pembinaan dan pemberdayaan para pelaku usaha. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dijabarkan dalam beberapa program prioritas yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.31**  
**Program dan Pagu Urusan Kearsipan**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp.)</b>
1	Program Pengembangan sistem administrasi kearsipan	1.075.000.000
2	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	1.225.000.000
3	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	250.000.000

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikianlah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 ini dibuat untuk menjadi acuan oleh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
ttd

**AIRIN RACHMI DIANY**